**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap kegiatan, usaha, atau apapun bentuknya apabila berkaitan dengan penggalian, pengolahan sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi *(resource based economy)* dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan *(life support system)*. Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2004-2009). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cara memajukan pembangunan. Salah satu unsur penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang industri. Namun dalam kegiatan industri akan diikuti dengan dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan hidup manusia.

Pada dasarnya pembangunan industri adalah sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan ini amat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga menimbulkan dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam. [[1]](#footnote-2) Industrialisasi juga menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama negara-negara maju. Bagi negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Banyak kebutuhan manusia hanya dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang disediakan dari sektor industri.[[2]](#footnote-3)

Dalam perkembangannya, meskipun kegiatan pembangunan industri telah mencapai tingkat pertumbuhan tinggi, ternyata juga menimbulkan kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat *(social gap)* mengingat pelaksanaan pembangunan serta yang menikmati hasil-hasilnya belum merata. Padahal dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan spirit Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) haruslah pembangunan berwawasan lingkungan.[[3]](#footnote-4) Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut Penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa: penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tantangan terbesar yang akan dihadapi negeri ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai daerah apabila pembangunan industri tidak memikirkan lingkungan sekitar.

Aktifitas industri di Indonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian Tahun 2006 sebagaimana dikutip Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007) menghasilkan 26.514.883 ton B3 yang tersebar di berbagai sektor industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton.[[4]](#footnote-5) Indonesia juga mengimpor B3 dari Jepang, China, Perancis, Jerman, India, Belanda, Korea, Inggris, Australia, dan Singapura.[[5]](#footnote-6)

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan industri, kebutuhan akan sumber daya pertambangan semakin bertambah. Di sisi lain, masalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan juga semakin menonjol. Kasus-kasus pertambangan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan antara lain adalah Freeport, Newmont Minahasa Raya (NMR), Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining (KEM), Adaro Enviro Coal, Arutmin, Kaltim Prima Coal, Indo Muro Kencana (IMK), Meares Soputan Mining, Nusa Halmahera Miniral, Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain.[[6]](#footnote-7)

Hingga tahun 2006, setidaknya 2559 ijin pertambangan dikeluarkan pemerintah Indonesia, yang meliputi lebih 30% di daratan. Jumlah tersebut, belum memasukkan jutaan hektar konsesi minyak dan gas, ataupun ratusan ijin dikeluarkan oleh pemerintah daerah sepanjang berlakunya otonomi daerah. Penggalian-penggalian baru terus dilakukan di daerah. Di Kalimantan Selatan, lebih dari 300 perijinan baru tambang batubara dikeluarkan pemerintah daerah. Ratusan lainnya di keluarkan pemerintah Kalimantan Timur. [[7]](#footnote-8) Sedangkan untuk kasus-kasus lingkungan yang timbul sebagai akibat kegiatan industri juga tidak sedikit.

     Sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi 24,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2002, dan menyerap 45 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Di lain pihak, peran penyerapan tenaga kerja ini telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum di samping membawa pengaruh yang positif seperti perluasan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dapat membawa pengaruh yang negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.[[8]](#footnote-9) Ditambah lagi budaya korporasi yang lebih memprioritaskan keuntungan, pertumbuhan, pengendalian pasar dan sebagainya sebagai tujuan organisasional (*organizational goal*), penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang kendor, subkultur tidak bermoral yang melanda masyarakat akan menambah maraknya kejahatan korporasi di masyarakat modern.[[9]](#footnote-10) Padahal idealnya keberadaan perusahaan itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar sebagai kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.[[10]](#footnote-11)

Akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Kerugian yang diderita korban sebagai akibat kegiatan korporasi tidak hanya dalam bentuk materi (harta benda), tetapi juga kesehatan (baik fisik maupun psikis), dan bahkan nyawa.

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985.[[11]](#footnote-12) Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan :

 *Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of victimization, the provision of services and the restoration of rights.*

Dalam deklarasi Milan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan *(victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Padahal selama ini orientasi hukum pidana Indonesia lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana.

Apabila mengacu pada konsep hukum sebagai “pengayom” bahwa hukum harus mengayomi semua orang baik sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana (pelanggar) maupun korbannya, maka pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana sudah memperoleh perlindungan dalam KUHAP, sedangkan korban kejahatan baik statusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak yang dirugikan belum memperoleh perlindungan hukum.[[12]](#footnote-13) Dalam KUHAP sudah tercantum hak-hak yang dipunyai oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana tetapi tidak ada hak-hak yang dipunyai oleh korban. Misalnya hak untuk mendapat bantuan juru bahasa, hak untuk didampingi penasehat hukum, dan jika terjadi salah tangkap berhak memperoleh ganti kerugian.

Undang-undang yang sudah memberikan aspirasi perlindungan terhadap korban tampak dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP diantaranya: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), dan sebagainya. Bentuk perlindungan tersebut misalnya: dalam UU Psikotropika sudah mengatur mengenai rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku yang sekaligus sebagai korban, disini korban mempunyai hak untuk direhabilitasi lamanya satu tahun. Dalam UU PKDRT, menurut ketentuan Pasal 10 korban mendapatkan hak-hak berupa:

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam UU PSK dan UU TPPO juga sudah mengatur hak-hak korban tetapi hanya mengenai korban dalam lingkup masing-masing. Walaupun bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang tersebut tidak maksimal, namun hal ini menunjukkan bahwa iktikad pemerintah untuk melindungi korban kejahatan sudah ada.

Pelanggaran berat yang dilakukan terhadap lingkungan umumnya dilakukan oleh industri besar, yang jelas dimiliki oleh golongan ekonomi yang sangat kuat. Jadi kejahatan lingkungan yang berat umumnya dilakukan oleh golongan atas (*white collar).[[13]](#footnote-14)* Misalnya: PT Dongwoo Environmental Indonesia di Bekasi, PT Yasunli Abdi Utama Plastik di Tangerang, CV COS di Kalianda Bandar Lampung[[14]](#footnote-15), CV Ezritex, PT Kesmatex dan PT Bintang Tri Putratex[[15]](#footnote-16). Semua perusahaan tersebut telah mendapat putusan Pengadilan.

Kasus pencemaran lingkungan tingkat Internasional yang mengemuka adalah kasus Minamata *Chisso Corporation* yang telah membuang merkuri ke teluk dan mengakibatkan anak-anak mengalami kanker otak langka dan ribuan orang cidera.

 Iktikad pemerintah untuk mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan juga dibarengi dengan pemberian predikat tertentu kepada perusahaan agar perusahaan lebih hati-hati sehingga pencemaran lingkungan berkurang. Perusahaan diberi kesempatan untuk melakukan peningkatan kinerjanya dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan, namun juga diberi prestasi.

Masalah perlindungan kepada korban memang belum sepenuhnya memberi rasa terlindungi bagi korban. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi[[16]](#footnote-17) di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 14 c KUHP, hanya sebagai salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender)*, tidak berorientasi pada korban (*victim)*.[[17]](#footnote-18) Dalam KUHAP memang sudah mengatur mengenai masalah ganti kerugian namun hal itu berkaitan dengan proses pidana yang berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitannya korban individu, lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi secercah harapan kepada korban, karena dalam undang-undang tersebut sudah ada pengaturan mengenai hak-hak korban dan saksi. Namun keberadaan undang-undang ini lebih berorientasi pada sistem peradilan pidana, dan itupun hanya ditujukan pada korban tindak pidana tertentu yaitu narkotika, korupsi dan terorisme serta tindak pidana lain yang dianggap berbahaya yang ditentukan lebih dulu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menjadi hal yang patut dipertanyakan mengenai korban dari perusakan atau pencemaran lingkungan tersebut, apakah sudah mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya atau belum. Selama ini Hukum pidana belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban kejahatan. Apabila korban ingin mendapatkan perlindungan hukum secara pidana akibat kerugian yang dideritanya maka ia harus mengusahakannya sendiri secara perdata.

 Pada prinsipnya tidak ada yang menginginkan lingkungan rusak atau tercemar, sehingga walaupun pembangunan di bidang industri dan pertambangan diperlukan tetapi tidak boleh mengabaikan lingkungan. Apalagi generasi yang akan datang harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak menjadi pewaris lingkungan yang rusak.

**BAB II**

 **VIKTIMOLOGI**

1. **Sejarah Perkembangan Viktimologi**

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi akan dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban misalnya: hak-hak dan kewajiban korban, perlindungan terhadap korban, tujuan pengaturan korban dan sebagainya.

Perhatian terhadap korban dimulai pada saat Hans von Hentig Tahun 1941 menulis sebuah artikel yang berjudul *“ Remark on the interaction of perperator and victim”.* Selanjutnya Pada Tahun 1947 Benyamin Mendelsohn menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban dengan judul “*New Bio-psyicho-sosial Horizons: Victimilogy”,* sehingga dikatakan bahwa Mendelsohn dianggap orang pertama kali menggunakan istilah viktimologi. Pada tahun 1948 atau tujuh tahun setelah artikel yang pertama, Von Hentig menerbitkan bukunya yang berjudul ”*The Criminal and his Victim*”.[[18]](#footnote-19)

Dalam buku tersebut, Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing yaitu:

1. Yang tertekan adalah yang bersikap tunduk dan lemah*;*
2. Yang bertentangan adalah yang mengalah dalam permainan kepercayaan dan penipuan
3. Yang ceroboh atau tidak tidak beralasan adalah yang melakukan kejahatan tersembunyi atau terlarang
4. Yang berhati pilu dan kesepian adalah yang peka dalam melakukan pencurian dan penipuan
5. Yang menjadi tempat adalah yang menimbulkan kekerasan/ kerusakan dan
6. Yang menghalangi penyerangan adalah yang tidak mampu untuk menentukan ukuran yang bertahan normal.[[19]](#footnote-20)

Pembahasan mengenai korban oleh Von Hentig dan Mendelsohn kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain diantaranya seperti Ellenberger (1954), yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama dengan H. Mainheim (1965), Schafer (1968) dan Fiseler (1978).

W.H. Nagel pada tahun 1949 juga telah melakukan berbagai pengamatan/ peninjauan mengenai subjek korban dalam tulisannya “*De Criminaliteit van Oss, Groningen”* . Sepuluh tahun kemudian dapat dikatakan viktimologi menjadi isu yang menarik di dunia.

Dalam penelitiannya P. Cornil di tahun 1959 menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan pembinaan terhadap pelanggar.

Perhatian terhadap korban kejahatan diwujudkan dalam simposium Internasional mengenai viktimologi di Yerusalem pada tanggal 5-6 September 1973. simposium kedua di adakan di Boston, pada tanggal 5-9 September 1976. dalam simposium ini menghasilkan bahwa viktimologi dianggap penting karena dapat membantu menambah kecerahan dalam menghadapi penjahat dan korbannya.

 Pada tahun 1977 diadakan simposium ke dua di Boston yang saat itu pula didirikan *World Society of Victimology (WSV)* yang dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban memang sangat terasa. Sekalipun demikian cita-cita tersebut akhirnya dapat terwujud pada saat diadakan kongres di Milan Italia pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985 dengan nama *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadpsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.[[20]](#footnote-21)*

Studi tentang korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan, sehingga pada awalnya “*special victimology”* yang mempelajari tentang korban kejahatan saja kemudian juga berkembang dalam bentuk “*general victimologi”* yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum dan bahkan kemudian muncul apa yang dinamakan dengan “*new victimology”* yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.[[21]](#footnote-22)

Sejak dikemukakannya masalah korban atau *victim o*leh Mendehshon hingga awal tahun dua ribuan sudah banyak pembicaraan mengenai korban. Bahkan ternyata Shuterland pada saat menulis buku kriminologi sudah memasukkan satu chapter sendiri mengenai victim. Sebagaimana dikemukakan oleh **John P. J. Dussich** sebagai berikut:[[22]](#footnote-23)

1. Tahun 1924 Edwin Sutherland *includes a chapter on victims in his criminology textbook*
2. Tahun 1937 Benjamin Mendelsohn *publishes his writings on the rapist and his victim*
3. Tahun 1941 Hans von Hentig *writes victim- criminal interactions*
4. Tahun 1947 Benjamin Mendelsohn menulis mengenai *“Victimology”* diJurnal Perancis*. coins the term “victimology” in a French journal*
5. Tahun 1948 *Hans von Hentig publishes his book The Criminal and His Victim*
6. Tahun1949 *Frederic Wertham first used the word “victimology“ in a book Show of Violence*
7. Tahun 1957 *Margery Fry proposes victim compensation in the London Times*
8. Tahun 1958 *Marvin Wolfgang studies homicide victims; uses the term “victim precipitation”*
9. Tahun 1963 *New Zealand enacts the first Criminal Compensation Act*
10. Tahun *1965 California is the first state in the USA to start Victim Compensation.*
11. Tahun 1966 *Japan enacts Criminal Indemnity Law*
12. Tahun 1966 USA *starts to survey crime victims not reported to the police*
13. Tahun 1967 *Canada creates Criminal Compensation Injuries Act as does Cuba and Switzerland*
14. Tahun 1968 Stephan Schafer *writes the first victimology textbook The Victim and His Criminal*
15. Tahun 1972 *The first three victim assistance programs are created in St. Louis, Missouri, San Francisco, California and in Washington, D. C.*
16. Tahun 1973 *the first international symposium on victimology is held in Jerusalem, Israel*
17. Tahun 1974 *the first police-based victim advocate project is started in Fort Lauderdale, Florida, USA*
18. Tahun 1975 *the first “Victim Rights’ Week” is organized by the Philadelphia District Attorney, Pennsylvania,USA*
19. Tahun 1976 *John Dussich launches the National Organization of Victim Assistance (NOVA) in Fresno, California, USA*
20. Tahun 1976 *Emilio Viano launches the first scholarly journal devoted to victimology*
21. Tahun 1976  *James Rowland creates the first Victim Impact Statement in Fresno, California, USA*
22. Tahun 1979 *The World Society of Victimology is founded in Munster, Germany*
23. Tahun 1980 *Mothers Against Drunk Drivers (MADD) is founded by Candi Lightner after one of her twin daughters was killed by a drunk driver who was a repeat offender*
24. Tahun 1981 *President Ronald Regan proclaims the first national Victims’ Rights Week in April*
25. Tahun 1982 *the first Victim Impact Panel established by MADD to educate drunk drivers about how their victims suffered, started in Rutland, Massachusetts, USA*
26. Tahun 1984 *The Victims of Crime Act (VOCA) establishes the national Crime Victims Fund from federal crime fines to pay for state victim compensation and services*
27. Tahun 1985 *The United Nations unanimously adopts the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*
28. Tahun 1987 *The US Department of Justice opens the National Victims Resource Center in Rockville, Maryland*
29. Tahun 1988 *The first “Indian Nations: Justice for Victims of Crime” conference is held by the Office for Victims of Crime in Rapid City, South Dakota, USA*
30. Tahun 1990 *The European Forum for Victim Services was founded by all the national organizations in Europe working for victims of crime in consultative status with the Council of Europe and the UN*
31. Tahun 1999 *The United Nations and the US Office for Victims of Crime publish the Guide for Policymakers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and the Handbook on Justice for Victims:* On the use and application of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
32. **Pengertian Viktimologi**

 *Victimology* berasal dari kata *victima* (latin) artinya korban, sedangkan *logos* (Yunani) artinya ilmu pengetahuan. Secara bahasa arti victimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Viktimologi juga dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban serta akibat-akibatnya sebagai suatu kenyataan sosial. Disini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, masyarakat dan korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbul korban adalah setiap tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa.[[23]](#footnote-24)

Studi tentang korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan, sehingga pada awalnya “*special victimology”* yang mempelajari tentang korban kejahatan saja kemudian juga berkembang dalam bentuk “*general victimologi”* yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum dan bahkan kemudian muncul apa yang dinamakan dengan “*new victimology”* yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. New Victimology bertujuan untuk: 1) mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 2) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan 3) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

1. **Ruang lingkup Viktimologi**

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk: 1) menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 2) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan 3) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Ruang lingkup viktimologi menurut J.E Sahetapy meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.[[24]](#footnote-25)

Dalam perkembangannya pada tahun 1985 Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji mengenai korban karena musibah atau bencana alam karena bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man’s will).* [[25]](#footnote-26)

Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:[[26]](#footnote-27)

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal:argumetasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen

**BAB III**

**KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

1. **Pengertian Korban**

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korban tindak pidana lingkungan hidup akan dipaparkan dulu pengertian korban kejahatan pada umumnya. Berbicara mengenai korban maka akan didapatkan beberapa makna, diantaranya korban yang terjadi akibat bencana alam (tanah longsor, gempa bumi, banjir dan sebagainya) dan korban sebagai akibat kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh J.E. Sahetapy bahwa korban dapat terjadi sebagai akibat perbuatan manusia dan di luar perbuatan manusia.[[27]](#footnote-28)

Perhatian terhadap korban kejahatan baru dimulai pada tahun 1947, yang diawali B. Mendelsohn yang menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban dengan judul “*New bio-psicho-sosial horizons: Victimilogy”,* sehingga dikatakan bahwa Mendelsohn dianggap orang pertama kali menggunakan istilah viktimologi. Pada tahun 1948 Von Hentig menerbitkan bukunya yang berjudul ”*The Criminal and his Victim*”.[[28]](#footnote-29) Dalam buku tersebut, Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing yaitu:

1. *the depressed, who are weak and submissive;*
2. *the acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers;*
3. *the wanton, who seek escapimin forbidden vices;*
4. *the lonesome and heartbroken , who are susceptible to theft and fraud;*
5. *the termentors , who provoke violence, and;*
6. *the blocked and fightings, who are unable to take normal defensive measures.[[29]](#footnote-30)*

Istilah korban merupakan suatu istilah yang sudah dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Orang akan dengan mudah mengatakan menjadi korban, ada korban manakala ada salah satu pihak yang dirugikan pihak lain, terjadi bencana, kecelakaan dan sebagainya.

 Secara harafiah korban merupakan terjemahan dari *victima*, yang berasal dari *victimology*,[[30]](#footnote-31) yang dalam bahasa Inggris disebut *victim.* [[31]](#footnote-32) Secara bahasa arti viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Viktimologi juga dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban serta akibat-akibatnya sebagai suatu kenyataan sosial. Disini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, masyarakat dan korporasi. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbul korban adalah setiap tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa.[[32]](#footnote-33)

Studi tentang korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan, sehingga pada awalnya “*special victimology”* yang mempelajari tentang korban kejahatan saja kemudian juga berkembang dalam bentuk “*general victimologi”* yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum dan bahkan kemudian muncul apa yang dinamakan dengan “*new victimology”* yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Secara harafiah arti korban adalah: 1. pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; 2. orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dsb.[[33]](#footnote-34). *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong.[[34]](#footnote-35)*

Dalam Resolusi MU-PBB No 40/34 dinyatakan bahwa: *"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.[[35]](#footnote-36)* Pengertian kerugian (*harm*) menurut Resolusi MU-PBB No 40/34 Tahun 1985 tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para korban. Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Pendapat lain mengatakan bahwa, *The victims are persons who suffer physically or mentally from the offences, which were committed to themselves, their family or their loved one.[[36]](#footnote-37)* Menurut Zvonimir Paul Separovic, *victims are those person who are threatened, injured or destroyed by an act or commission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanours, economic offences, non fulfilment of work duties or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc) suffering may be caused by another man (man made victim) or another structure where people are also involved.[[37]](#footnote-38)* Dari pengertian ini jelas bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi orang lain, instansi atau lembaga struktur. Pihak yang menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat pula korporasi, Negara, asosiasi, keamanan dan agama.

Menurut Arif Gosita Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti: 1. perorangan /individu *(victimisasi primair*), atau 2. kelompok baik swasta maupun pemerintah.[[38]](#footnote-39) Sahetapy [[39]](#footnote-40)mengatakan bahwa, korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban. V*ictim in other words, is identity, a social artefact dependent, at the outset, on an alleged transgression and transgressor and then, directly or indirectly, on an array of witnesses, police, prosecutors, defence counsel, jurors, the mass media and others who may not always deal with the individual case but who will nevertheless shape the larger interpretive environment in which it is lodged.[[40]](#footnote-41)* *A vicitm of crime is a person who has suffered harm can be physical injury, emotional trauma or financial loss.[[41]](#footnote-42)* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[[42]](#footnote-43)

Penentuan batasan pengertian korban kejahatan atau dampak kejahatan terhadap korbannya adalah bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan, karena menjangkau pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat tak terbatas dan tak terhitung.

 Penjelasan mengenai korban kejahatan paling tidak mencakup tiga hal :

1. Siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan
2. Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban kejahatan, dan
3. Siapa yang bertanggung jawab dan atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tersebut dipulihkan

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa korban kejahatan itu terdiri dari:[[43]](#footnote-44)

1. *Ditinjau dari sifatnya*: ada yang individual dan kolektif. Korban individial karena dapat diidentifikasi maka perlindungan korban dilakkan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian dalam Pasal 91 UU No 32 tahun 2009 diberikan jalan keluar terhadap korban kolektif berupa hak menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup melalui *class action*.
2. *Ditinjau dari jenisnya*, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat.

Luas sempitnya pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban dari kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian yang kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika , kejahatan terorganisir, dsb.

 Menurut Barda Nawawi Arief, seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku kejahatan itu sudah ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.[[44]](#footnote-45)

**B. Hak-hak dan kewajiban Korban**

Hubungan antara korban dengan pelaku menyatakan bahwa suatu kejahatan terjadi karena interaksi antara korban dan pembuatnya. Selama ini hukum pidana hanya memfokuskan pada pelaku atau *offender oriented* tanpa menghiraukan korbannya.

Berbicara mengenai kedudukan korban dalam tindak pidana maka tidak lepas dari hak dan kewajiban korban itu sendiri. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maka selain kejahatan-kejahatan itu ditanggulangi maka kepada korban selaku pihak yang dirugikan harus dilindungi. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan artinya bisa diterima oleh pelaku bisa tidak, terhantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.[[45]](#footnote-46)

Menurut Ercman dari “*Council of Eropa*” menyampaikan rekomendasi khusus mengenai hak-hak korban adalah sebagai berikut:[[46]](#footnote-47)

1. *The victim should have the right to be informed promptly about the outcome of previous investigations and about his personal position during all phases of the proceeding. This might give him an opportunity to take preventive measures against any interference with his right to privacy.*
2. *Questioning the victim should at all stages of proceedings be conducted with due regard to his personal right and human dignity.*
3. *In any contacts with press reporters or in connections with press reporting of trials, the need to respect the personal rights of the victim should be borne in mind.*
4. *There should be close cooperation between journalists and the officers of the criminal justice system in order to avoid undue publicity which might have adverse effects on the rights of the victim*

Menurut Arif Gosita hak dan kewajiban korban adalah sebagai berikut:[[47]](#footnote-48)

Hak korban:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan
2. korban berhak menolak kompensasi (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya)
3. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia
4. korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. korban berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. korban berhak menjadi saksi bila tidak membahayakan dirinya,
7. korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban dan menjadi saksi
8. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum

Kewajiban korban:

1. tidak main hakim sendiri
2. berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak.
3. bersedia dibina atau membina diri sendiri supaya tidak menjadi korban lagi
4. tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemmpuan pembuat korban
5. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi kompensasi sesuai dengan kemampuannya (misal dengan mencicil)
6. menjadi saksi.

Uraian mengenai hak-hak korban tersebut ternyata dalam perundang-undangan Indonesia belum terumuskan sehingga korban tetaplah menjadi korban yang hak-haknya belum terlindungi. Dalam perkembangannya Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memberikan aspirasi dengan mengatur mengenai hak-hak korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No 23 / 2004 korban berhak mendapatkan:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam pelaksanaannya hak-hak korban tersebut tidak mudah untuk mendapatkannya karena aturan pelaksanaanya belum ada. Misalnya hak mendapatkan pelayanan kesehatan, caranya bagaimana, apakah semua rumah sakit boleh, apakah seluruh biaya pengobatan dilayani, dan seterusnya.

Dari aspek sistem peradilan pidana, peranan korban kejahatan menjadi penting dilihat dari sisi keadilan untuk memperoleh hak-haknya. Adapun pihak korban berhak untuk :

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pada korban dalam terjadinya kejahatan dan delikuensi tersebut.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasehat umum.
8. Mempergunakan upaya hukum.

Selain itu pihak korban juga mempunyai kewajiban untuk :[[48]](#footnote-49)

* 1. Tidak membuat korban baru dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
	2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
	3. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
	4. Ikut serta membina pembuat korban.
	5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
	6. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
	7. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap imbalan/memberi jasa).
	8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

**C.Tindak pidana lingkungan hidup**

**S**uatu tindak pidana tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Bahkan dapat dikataan bahwa kejahatan adalah produk masyarakat dan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan baik individu maupun masyarakat. Semakin bertambah masyarakat dan makin meningkat pembangunan, maka kejahatan juga semakin meningkat.

 Tindak pidana merupakan terjemahan dari ”*strafbaarfeit”*.[[49]](#footnote-50) Perkataan *”feit”* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti ” sebagian dari suatu kenyataan” atau *’een gedeelte van de werkewlijkheid”,* sedang ”*straf baar*” berarti ”dapat dihukum”, sehingga kata ”*strafbaarfeit”* dapat di terjemahkan sebagai ” sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[[50]](#footnote-51)

 Pengertian mengenai tindak pidana ada beberapa pendapat. Menurut Emile Durkheim[[51]](#footnote-52) bahwa, “*crime is present not only in the majority of societies of one particular species but in all society that is not contronted with the problem of*

*criminality. It is form changes : the act thus caracterize are not the same every*

*where : but every where and always, there have been men who have behaved in such a way as to draw upon then selves penal repression.*

Untuk mengantisipasi supaya masalah pencemaran dan atau perusakan lingkungan tidak semakin merajalela maka perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan harus dilarang, sehingga kepada siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi pidana.

 Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses* yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain.[[52]](#footnote-53)

Dalam merumuskan TPLH hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata *(actual* *harm)* tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi.

Sehubungan dengan itu untuk *generic crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, karena akibat merupakan unsur yang hakiki yang harus dibuktikan. Namun dalam tindak pidana yang bersifat khusus (*spesific crimes*) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan.

Dalam merumuskan TPLH hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental *( mental element*). Element material mencakup: (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission)* yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.[[53]](#footnote-54) Elemen mental mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, recklessness (*dolus eventualis atau culpa gravis)* atau kealpaan *(negligence*), sedangkan hukum kita yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum kontinental membedakan kategori-ketegoti kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).

Dalam penulisan ini yang dimaksud tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang diatur dalan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud terdiri dari KUHP, Undang-undang Lingkungan hidup sebagai general Act dan undang-undang khusus terkait lingkungan hidup sebagai secoral Act.

1. **Pengertian Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH)**

Mengenai siapa yang dimaksud korban dalam TPLH tidak sama dengan korban kejahatan pada umumnya. Apalagi korban TPLH dalam konteks disertasi ini berkaitan dengan aktivitas korporasi, sehingga munculnya korban karena ada aktivitas lain.

Menurut Muladi, dalam TPLH hal yang paling mendasar adalah kualifikasinya sebagai tindak pidana ekonomi *(economic crimes*). Dalam TPLH akibatnya sangat relatif, kadang dapat menyebabkan orang luka, mati, pingsan atau tidak berdaya yang secara yuridis disamakan dengan kekerasan.

Korban pertama kali dalam TPLH sebagai tindak pidana ekonomi adalah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, karena tindak pidana ekonomi selalu berkaitan dengan sistem ekonomi suatu bangsa. Hal ini tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kemungkinan korban kedua adalah manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik maupun mental. Dan korban selanjutnya adalah perusahaan saingan yang kalah effisien karena taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya yang besar. Korban potensial lainnya adalah karyawan (*employees)*, karena bekerja pada lingkungan yang tidak aman/ tidak sehat.[[54]](#footnote-55)

Apabila hal-hal di atas merupakan korban yang bersifat langsung maka proses viktimisasi akibat tindak pidana lingkungan yang bersifat tidak langsung *(indirect victimization*) dalam bentuk kerugian negara berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan peradilan pidana, yang tentu saja lebih kompleks dan lebih mahal dibanding dengan tindak pidana biasa. Disamping itu dapat berupa kerugian sosial *(social damage*), karena sebagai tindak pidana ekonomi mengandung pula *corrosive effect* terhadap standart moral yang seharusnya ditaati dalam menjalankan usaha.[[55]](#footnote-56)

 Konsep korban dalam TPLH berkaitan erat dengan konsep kerugian dan kerusakan lingkungan. Hal ini meliputi kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan *(threatened harm*), sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam TPLH seringkali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak.

 Korban tindak pidana lingkungan hidup menurut Nyoman Serikat Putra Jaya terdiri dari[[56]](#footnote-57): a) kepentingan negara atau kepentingan masyarakat; b) Manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik maupun mental; c) Perusahaan pesaing yang taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolah limbah dengan biaya besar dan d) Karyawan yang bekerja pada suatu lingkungan yang tidak sehat.

Korban dalam kaitannya dengan AMDAL dapat juga diartikan sebagai dampak sosial yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan yang dalam PP 51/1993 disebut sebagai rencana usaha atau kegiatan.[[57]](#footnote-58)

Konsep korban dalam TPLH berkaitan erat dengan konsep kerugian dan kerusakan lingkungan. Hal ini meliputi kerugian dan kerusakan nyata *(actual* *harm)* dan ancaman kerusakan *(threatened harm*), sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam TPLH seringkali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak.[[58]](#footnote-59)

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Yang dilindungi oleh hukum pidana tidak hanya alam, flora dan fauna *(the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*the anthropocentric approach*).

Perlindungan korban dalam TPLH ini tidak hanya ditujukan pada korban secara konkrit *(factual victim*) tetapi juga mereka-mereka yang berpotensi menjadi korban *(potential victim*). Jika demikian maka sudah sewajarnya dalam perundang-undangan pidana, konsep penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku juga memuat perlindungan terhadap korban dan juga calon korban.

Adapun yang dimaksud dengan korban dalam dalam buku ini adalah mereka yang secara fakta (*factual victim*) maupun yang berpotensi (*potential victim*) menderita kerugian secara materiil akibat suatu tindak pidana lingkungan hidup. Mereka dalam hal ini adalah orang perorangan, masyarakat, fasilitas publik dan/ atau lingkungan .

**BAB IV**

 **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN**

**A.Dasar filosofis perlindungan hukum terhadap korban/ arti pentingnya perlindungan terhadap korban**

Di Indonesia kewajiban negara terhadap warganya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Dalam Pembukaan UUDN RI 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa negara ”......melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”. Adanya kalimat “......melindungi segenap bangsa Indonesia...” yang merupakan salah satu tujuan negara, berarti negara turut bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tanggungjawab negara untuk melindungi warganya tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, bahwa : “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 45 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya. Pasal ini juga merupakan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia tentang keseimbangan antara hak dan kewajibannya dan tidak ada diskriminasi diantara warga negara.

Selanjutnya Pasal 28A menentukan bahwa: “ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kemudian Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu juga diatur dalam Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 Dengan demikian maka negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Prinsip perlindungan hukum sebetulnya melekat pada hak asasi manusia. Menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.[[59]](#footnote-60) Sejalan dengan itu A. J. Milne mengatakan bahwa “ *A regime which protects human rights is good, one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad”[[60]](#footnote-61).*

 Pada dasarnya manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya, baik itu ketidakseimbangan mengenai hak-haknya, perilaku terhadapnya, ketidakseimbangan alamiah dan lain-lainnya. Perlindungan itu dapat secara konkrit berupa perbuatan maupun secara abstrak yaitu berupa aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupannya.

Sehubungan dengan hal itu Konggres PBB tentang pencegahan Kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan (*Fourth Congress on the prevention of Crime and the Treatment of Offenders)* di Kyoto, Jepang tanggal 17 sampai 26 Agustus 1970 sudah mengemukakan bahwa disamping perencanaan pembangunan nasional negara harus pula mengadakan perencanaan mengenai hal-hal menyangkut perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan (*social defence planning*). Salah satu usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari gangguan kejahatan adalah melalui pengaturan di dalam hukum pidana.[[61]](#footnote-62)

Dalam hukum pidana Indonesia saat ini kedudukan korban belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan.  Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

Argumentasi lain bahwa korban harus dilindungi sebagaimana dikemukakan Muladi adalah[[62]](#footnote-63): argumen kontrak sosial *(social* *contract argument*) dan argumen solidaritas sosial *(social solidarity* *argument).* Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Selain itu*,* perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Apabila terjadi tindak pidana berarti negara telah gagal dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Oleh karena itu negara wajib memberi ganti kerugian kepada korban.

Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, perlindungan hukum yang dimaksud ditujukan pada perlindungan hukum kepada masyarakat, pemrakarsa kegiatan dan atau usaha, maupun kepada pemerintah sebagai penguasa. perlindungan hukum tersebut meliputi juga perlindungan lingkungan dan juga perlindungan generasi yang akan datang.

Penjabaran lebih luas mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah diakuinya hak lingkungan hidup untuk dilindungi dan dilestarikan, namun lingkungan hidup sebagai penyandang hak tidak dapat mempertahankan haknya tanpa bantuan orang untuk mengajukan perkara pencemaran dan aatu perusakan lingungan melalui pengadilan. Untuk itu diperlukan peran serta setiap orang yang mencakup orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.[[63]](#footnote-64) Adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan berarti telah melanggar hak manusia dan lingkungan atas keberlanjutan daya dukungnya sehingga diperlukan peran berbagai pihak untuk mempertahankan hak tersebut salah satunya dengan mengajukan gugatan misal diwakili LSM atau korporasi.

B**. Bentuk –Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Setiap terjadi kejahatan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban harus menanggung kerugian baik materiil maupun immateriil. Akibat penderitaan yang dialami korban tersebut maka akan dijatuhkan pidana pada pelaku yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan korban karena korban tetap menderita. Pada dasarnya manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dialaminya, baik itu ketidakseimbangan hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu dapat berupa perbuatan maupun aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras dalam kehidupannya.

 Beberapa deklarasi PBB yang terkait dengan perlindungan korban adalah [[64]](#footnote-65):

1. *Declaration of Basic principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power (generale Assembly Resolution 40/34).*
2. *Implementation of the Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and abuse of Power (ECOSOC Resolution 1987/57)*
3. *Victims of Crime and Abuse of Power (ECOSOC Resolution 1990/22)*
4. *Protection of the human eights of Victims of Crime and Abuse of power*

 Dalam hukum pidana dikenal adagium ” *Niminem Laedere*” dan ”*Suum Cuique* *ribuere”* keduanya saling berkaitan. Adagium pertama mengandung arti ”jangan merugikan orang lain”. Sedang yang ke dua mengandung arti ” memberikan setimpal dengan salah/jasa/perbuatannya”. Bila kedua adagium tersebut dirangkaikan maka dapat diartikan ” siapa saja yang merugikan orang lain, akan diganjar dengan hukuman yang setimpal atau kesebandingan hukum.[[65]](#footnote-66)

 Menurut Barda Nawawi Arief Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:[[66]](#footnote-67)

1. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi menjadi korban tindak pidana.
2. dapat diartikan juga sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”(jadi identik dengan penyantunan korban). bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Perlindungan yang pertama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dengan adanya perumusan perundangan yang sudah mengaturnya tidak akan timbul korban, sering disebut dengan perlindungan *in abstracto.* Sedangkan yang ke dua disebut dengan perlindungan *in concreto* atau perlindungan secara konkrit .

Dalam rangka konsep pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan, maka pertama-tama yang diperhatikan adalah essensi kerugian yang diderita korban. Kerugian tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga bersifat psikologis.

Secara teoritis bentuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana ada dua macam yaitu kompensasi dan restitusi. Pengertian restitusi dalam hal ini yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan kompensasi ialah pemberian bantuan keuangan kepada korban tindak pidana yang diambilkan dari dana umum /negara. Restitusi mendasarkan diri dari tanggungjawab pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang diperbuatnya. Sasaran dari restitusi sedapat mungkin menutup semua kerugian yang diderita korban. Sedangkan kompensasi lebih menonjolkan pada adanya tanggungjawab bersama masyarakat/negara di dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sasaran dari kompensasi adalah suatu pernyataan simpati dari masyarakat/negara untuk meringankan beban dari seorang korban tindak pidana.

 Ada beberapa pengertian mengenai restitusi dan kompensasi yaitu: a. *Restitution is a formal procedure mandated by a judge after guilt is determined and as part of a sentence which provides money and/or services to the victim for damages or suffering which resulted from their victimization, to be paid by the offender.[[67]](#footnote-68)* Sedangkan pengertian mengenai kompensasi juga diatur dalam ke dua ketentuan tersebut di atas. *Compensation is a formal procedure mandated by law which provides money to victims or those “out of pocket” expenses directly resulting from their victimization, to be paid by the state.[[68]](#footnote-69)*

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 29 November 1985* angka 8 dikatakan bahwa ada *Restitution* jika *Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.*

 Kompensasi mempunyai makna sebagai pemberian bantuan terhadap korban dari suatu tindak pidana yang diambil dari dana umum. Karena itu dalam proses pemberian bantuan serupa ini sering tidak terdapat hubungan langsung antara pelaku dan korban juga tidak bergantung apakah pelaku tindak pidana itu tertangkap lalu dijatuhi pidana. Dari pengertian dan mekanisme tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem kompensasi lebih merupakan upaya dari sistem kesejahteraan sosial dibanding sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.[[69]](#footnote-70)

 Perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi dapat berupa: a. pengembalian harta milik; b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; c. penggantian biaya penguburan dan uang duka cita. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial (*social* *contract)* dan solidaritas sosial *(social solidarity*) menjadikan masyarakat dan Negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya korban. Dari aspek tersebut menjadikan kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung pada bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana tersebut diperoleh dari pemerintah atau dana umum.[[70]](#footnote-71) Sebaiknya ada kombinasi antara restitusi dan kompensasi. Apabila mungkin harus diusahakan adanya ganti kerugian oleh piahak pelaku. Perbuatan ini dapat membantu mengembangkan bagaimana mengaturnya agar tidak menimbulkan akibat sampingan yang negatif. Restitusi ini berfaedah untuk menambah jumlah kompensasi yang tidak besar.[[71]](#footnote-72)

Menurut Stephen Schafer,[[72]](#footnote-73) ada empat system pemberian restitusi dan kompensasi yaitu:

1. ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban anti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

 Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau Negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender).*

Dalam kaitannya ganti kerugian pada waktu Konggres PBB di Milan tahun 1985 : 7th *United Nations Congress on Prevention of Crime and The Treatment of offenders* Pasal 5 menentukan:[[73]](#footnote-74)

*1. In the state where general social insurance programmes are insufficient, the State should establish compensation programmes to assist victim who, because of offenders lack of means or for any other reason are unable to receive reparation from them.*

*2. state compensation should include financial awards for physical and mental injury, loss of income rehabilitation and funeral expenses.*

*3. state compensation should be provided promptly and in an amount comparable to social assistance available to those suffering similar misfortunes. In appropriate cases state compensation may be provided to the victims on an interim basis before finalization of criminal proceedings.*

*4. international funds, such as the United Nations Voluntary Funds for Victims of Torture, should be strengthened and expanded to provide compensation for victims or their dependents.*

*5. certain state have assumed responsibility for collective victimization and have consequently establish compensation programmers. Where appropriate, other state should draw on their experience.*

 Dengan demikian maka menurut ketentuan Pasal 5 Konggres PBB ke 7 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penindakan Terhadap Pelanggar tahun 1985 di Milan Italia bahwa: dalam keadaan dimana program asuransi sosial tidak cukup, maka Negara harus menetapkan program kompensasi untuk membantu korban yang karena pelaku kurang mampu untuk memberi atau memperbaiki kembali. Selanjutnya kompensasi dari Negara harus mencakup biaya cidera fisik dan mental, kehilangan pendapatan dan biaya pemakaman. Disamping itu kompensasi dari Negara harus diberikan dengan segera dan jumlah yang sebanding dengan bantuan sosial yang ada. Kompensasi yang tepat dari Negara pada kasus dapat diberikan pada korban secara sementara sebelum proses pidana berakhir. Terkait dengan PBB maka dana sukarela dari PBB yang dianggarkan untuk korban penyiksaan/penganiayaan, harus diperkuat dan diperluas disediakan untuk kompensasi kepada korban atau orang yang menjadi tanggungannya.

Menurut Arif Gosita,[[74]](#footnote-75) alasan-alasan utama ganti kerugian kepada korban oleh negara antara lain adalah sebagai berikut:

1. kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
2. tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban;
3. ketidaklayakan pembagian penghasilan; dan
4. pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Kerugian yang diderita dikembalikan kepada korban pada keadaan semula, atau sekurang-kurangnya mendekati keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Kompensasi bermaksud sekedar memberi imbalan kepada korban tindak pidana yang lebih berupa suatu pernyataan simpati atas kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian bantuan atas kerugian yang diderita oleh si korban bukan satu-satunya cara untuk memuaskan korban. Dengan terlibatnya masyarakat atau negara dalam memberikan kompensasi terhadap penderitaan korban, merupakan suatu upaya tersendiri yang dapat mengurangi penderitaan korban.[[75]](#footnote-76)

Berbagai kerugian yang diderita oleh kelompok masyarakat atau perorangan seharusnya mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang melakukan pecemaran dan atau perusakan lingkungan yang dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Jika terjadi demikian maka beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut: a) siapa yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan; b) siapa yang terkena dampak negatifnya; c) status kepemilikan; d) jenis dampak; e) besaran dampak; f) lamanya dampak; g) jenis sumber daya alam dan lingkungan yang terkena dampak dan sebagainya.[[76]](#footnote-77)

Penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[[77]](#footnote-78)

* 1. adanya laporan dari masyarakat atau instansi tentang dugaan telah terjadi adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan pada suatu daerah/tempat.
	2. Verifikasi tempat kejadian tentang adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan oleh lembaga yang berwenang.
	3. Pembuktian terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan oleh ahli yang berkompeten melalui pengamatan lapangan, penelitian dan data lain yang diperlukan.
	4. Perhitungan ganti kerugian oleh ahli terhadap komponen lingkungan yang dirusak atau mengalami pencemaran.
	5. Proses ganti kerugian kepada negara dan masyarakat melalui jalur pengadilan

Dalam hal pemberian ganti kerugian kepada korban yang perlu diperhatikan adalah: [[78]](#footnote-79)

* 1. bebankan biaya kepada pelanggar

 perintah untuk membayar ganti rugi dan restitusi membuat pengadilan dapat mengatasi dampak kejahatan linggkungan kepada korban, sehingga biaya yang harus ditangggung oleh negara maupun korban dialihkan kepada pelanggar.

* 1. upaya perdata di pengadilan pidana

untuk memidana pelaku pelanggaran lingkungan secara efektif, pengadilan perlu memiliki banyak pilihan yang mencakup upaya perdata seperti perintah untuk membayar ganti rugi dan restitusi.

* 1. dampak pernyataan bersalah dalam upaya perdata.

Memasukkan upaya perdata pada proses pidana mungkin akan menimbulkan masalah kesediaan pelanggar untuk mengaku bersalah (plea guilty) kalau pengakuan yang diberikan itu membuatnya bertanggungjawab untuk menanggung akibat pidana dan perdata. Masalah ini bisa sedikit diatas dengan memastikan adanya kesepakatan antara korban dan pelanggar untuk menyelesakan masalah ganti rugi dan restitusi dalam proses pidana.

Untuk meminimalisasi kesulitan perintah membayar ganti rugi dan restitusi dan kesulitan untuk membuktikan kerusakan jika tidak ada kesepakatan dapat dikurangi dalam peradilan pidana dengan menetapkan batas maksimum bagi perintah semacam itu. Batas tersebut dapat ditetapkan secara sepihak, atau ditentukan dalam bentuk suatu persentase tertentu dari jumlah denda yang diatur dalam undang-undang untuk pelanggaran tersebut.

Secara umum jika seseorang sudah menjadi korban kejahatan maka ada beberapa pihak yang dapat mendukung demi penyembuhan korban dintaranya dari keluarga, teman, aparat penegak hukum dan sebgainya. Sebagaimana bagan di bawah ini yang dikemukakan oleh Emiko Okubo[[79]](#footnote-80) dalam seminar di Tokyo tahun 2005 yaitu:

**Support needed by crime victims**

Provision of support and information by police

* Utilization of the Offices for Supporting Crime Victims of NPA and prefectural police departments, the Early Support System, and the Notification System to Crime Victims
* Appropriate behaviors of investigators in contacting victims and providing information to victims

Development and implementation of support measures based on the Basic Law for Supporting Crime Victims, Etc., and provision of opportunities for crime victims to participate in legal proceedings, etc.

* Counseling and information services
* Assistance for filing a claim for damages
* Expansion of the Crime Victims Benefit Payment System
* Ensuring of security
* Provision of a place to live and a stable job
* Increased opportunities to take part in criminal proceedings
* Special consideration to the feelings of victims in the protection, investigation and court processes
* Enhanced awareness of the general public
* Assistance to private victim support group

Support from mental health professionals such as psychiatrists and proper responses by administrative institutions

* Appropriate treatments and counseling
* Better understanding of PTSD and other traumatic symptoms
* Development of mental health professionals
* Livelihood support and health
* management support services
* by local authorities, public health offices, etc.

Enhancement of immediate support activities of by Crime Victim Support Centers, crime victim counselors, etc.

* Implementation of early and direct support activities
* Improvement of telephone and in-person counseling services
* Development of livelihood assistance through collaboration with related organizations
* Advocate activities (in the interest of crime victims)

**Cheering and support from friends, acquaintances and neighbors**

* Practical assistance such as writing letters and giving flowers to victims and helping them with their housekeeping chores
* The people around crime victims need to cuddle up with those victims and warmly watch them recover from their hardship.

**Cooperation of media outlets**

* Reports on the necessity and the present situation of victim support to facilitate the creation of a society worth living in
* Coverage of similar cases and victims’ notes
* Enlightenment efforts to bring to light the shortcomings of related legal systems

Mutual support between victim families

* Families of crime victims must have an attitude not to interfere with the feelings of other family members
* Families of crime victims must not make an important decision about their family affairs when deeply depressed.
* **Expansion and improvement of the crime victims benefit payment system**
* **Development of research and studies on crime victim support measures**

Consideration at workplaces

* Reduction of tasks
* Understanding of the feelings of victims

**Enhancement of legal practitioner’s understanding and support and their provision of information to crime victims**

* Explanations and information about criminal proceedings and court procedures
* Improvement of understanding about the situation of crime victims and provision of free counseling services
* Enhancement of the Bar Associations’ Crime Victim Support Committee system and its actual support activities
* Improvement of the understanding, attitude etc. of those working in legal workplaces about the feelings of crime victims

**Self help activities among crime victims (referrals to self-help groups and those in similar situations)**

* Helping crime victims get out of the feelings of solitude and isolation
* Provision of a place where crime victims can outpour their feelings with a sense of ease
* Provision of a place where crime victims can restore their sense of trust in the society
* Provision of a place where crime victims share their pains with each other and cheer up each other
* Provision of a place where crime victims can regain their dignity as human beings
* Provision of a place where crime victims can acquire tips for living a better life

Selanjutnya dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model pengaturan yaitu:[[80]](#footnote-81)

1. Model hak-hak prosedural (*The prosedural Rights Model)*
2. Model pelayanan (*The Services Model)*

Pada model pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

Pada model pelayanan penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, Misalnya dalam bentuk pelayanan dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensaasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Masing-masing model tersebut ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan model prosedural adalah: 1) dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat; dan 2) korban dapat aktif dalam proses peradilan.

Adapun kelemahan-kelemahan pada model pertama ini adalah: 1) model ini dianggap dapat menciptakan konflik antar kepentingan umum dan kepentingan pribadi; dan 2) kemungkinan hak-hak yang diberikan kepada korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari si pelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization).*

 Pada model kedua, keuntungannya adalah: model ini menghemat biaya karena dengan adanya pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban. Sedangkan kelemahannya adalah: kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama.

Menurut Yenti Garnasih model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya. Kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauhmana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. [[81]](#footnote-82)

**BAB V**

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

1. **Dalam KUHP**

 Untuk mengetahui apakah suatu undang-undang sudah memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana lingkungan hidup atau belum, maka dapat dikaji keseluruhan sistem pemidanaan substantif yang terdiri dari perumusan tindak pidananya, pertanggungjawaban dan sanksi pidananya.

Ditinjau dari perumusan tindak pidananya, sebetulnya sebelum Indonesia mempunyai aturan khusus yang mengatur tentang lingkungan hidup, ada beberapa pasal yang tersebar dalam KUHP yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Pasal-pasal tersebut hingga sekarang belum dicabut, namun dengan adanya asas *lex specialis derogat legi* *generalis,* maka yang diperlakukan peraturan yang khusus jika terjadi kasus lingkungan hidup. Selain itu subjek hukum dalam KUHP hanya orang, sehingga jika pelaku TPLH adalah korporasi KUHP juga tidak dapat diterapkan. Adapun Pasal-pasal yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah:

Pasal 187 : barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir,

Pasal 187 bis :

membuat, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum,

Pasal 188 : Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir,

Apa yang diatur Pasal 187-188 tersebut intinya hampir sama yaitu menimbulkan bahaya banjir, ledakan atau kebakaran yang korbannya bisa barang, orang atau mengakibatkan matinya orang. Kata ”barangsiapa” di awal pasal adalah orang karena memang subjek hukum dalam KUHP hanya orang.[[82]](#footnote-83) Dengan demikian yang dapat dipertanggungjawabkan hanya orang, korporasi tidak mungkin dipertanggungjawabkan. Disamping itu KUHP hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaku tanpa mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana nasib si korban.

 Pasal lain yang terkait dengan lingkungan hidup adalah Pasal 191 : barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan. Pasal 202 : memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain. Pasal ini mirip dengan pengertian ”pencemaran” yang ada dalam UUPLH sekarang yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tanah, sumur, sumber yang dapat membahayakan nyawa manusia

Pasal-pasal lain dalam KUHP, secara singkat antara lain diatur dalam :

Pasal 497: menyalakan api di jalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

Pasal 500: membuat obat ledak tanpa ijin

Pasal 501: menjual.....dsb barang makanan/minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit

Pasal 502: berburu di hutan negara tanpa ijin

Pasal 503: membuat gaduh/berisik tetangga di waktu malam atau dekat dengan bangunan ibadah;

Pasal 548-549 membiarkan unggas ternak berjalan di kebun/tanah benihan.

Ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari persoalan dasar dari hukum pidana, dan merupakan unsur penting dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari asas hukum pidana yang keberadaanya sangat diperlukan. Hal itu karena dalam hukum pidana Indonesia menganut asas hukum tidak tertulis “*Geen straft zonder schuld*” yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan, tidak dipidana seseorang yang melakukan tindak pidana jika tidak ada kesalahan.

Pasal-pasal yang tersebar di KUHP sebagaimana tersebut di atas mengatur mengenai jenis perbuatan pidana yang dilarang, dan untuk pertanggungjawabannya ada pada orang/manusia, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bukan subjek hukum pidana. Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 Sr) terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu dimulai dengan kata *hij die*, ’barangsiapa’.[[83]](#footnote-84) Pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa : ”jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya”. Apabila terjadi TPLH yang dilakukan oleh korporasi maka jarang digunakan dakwaan dengan pasal-pasal KUHP.

Terkait dengan sanksi pidana Dalam formulasi ini sanksi pidana yang dijatuhkan sangat ringan, lagi pula hanya dijatuhkan kepada pelaku individu, maka KUHP belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* apalagi jika pelaku TPLH korporasi.

1. **Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Peraturan mengenai lingkungan hidup pada saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2009 Lembaran Negara Nomor 140 tahun 2009. Undang-undang ini mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.[[84]](#footnote-85) Namun peraturan pelaksanaan dari UUPLH 1997 masih digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang No 32 tahun 2009. [[85]](#footnote-86)

Dengan demikian sebagaimana UU 23/1997 maka UU No 32/2009 juga sebagai *General Act*, karena masih ada beberapa undang-undang lain sebagai *Sectoral Act* yang tersebar di luar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Undang-undang tersebut diantaranya Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan sebagainya.

Undang-undang lingkungan hidup yang lama No 23 tahun 1997 perlu dilakukan pembaruan karena beberapa alasan, diantaranya adalah: [[86]](#footnote-87)

a. bahwa semangat otonomi daerah telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

c. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, namun demikian, masih ada kelemahan secara substansial, struktural, maupun kultural.

Secara substansial, kelemahan yang ada antara lain dengan munculnya multitafsir terhadap norma-norma dalam UUPLH. Hal ini mengakibatkan, salah satunya penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Secara struktural, kelemahan tersebut antara lain dengan masih kuatnya paradigma kebijakan yang pro investasi dan mengabaikan pertimbangan lingkungan. Sedangkan pada tingkat kultural, dukungan terhadap perlindungan lingkungan masih lemah yang diindikasikan oleh lemahnya tingkat penaatan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Rachmat Witular dalam sambutannya saat pengesahan undang-undang tersebut pada sidang DPR mengatakan bahwa:[[87]](#footnote-88) UU tersebut (UU No.23/1997) telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural maupun kultural. Lebih lanjut Rahmat Witular mengatakan bahwa beberapa hal penting dari UU PPLH yang belum atau masih kurang dalam UU lingkungan hidup sebelumnya, antara lain kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disingkat UU PPLH) terdiri dari 17 bab dan 127 pasal. Dalam penjelasan umum angka tujuh UU No. 32 tahun 2009 dikatakan bahwa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Mengenai kebijakan formulasi tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH diatur dalam Bab XV mulai Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 1997 yang menyebut bahwa tindak pidana dalam UUPLH merupakan kejahatan maka dalam undang-undang baru juga menegaskan demikian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa: Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Dari formulasi UU No 32 tahun 2009 tampak adanya kriminalisasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dilihat dari jumlah pasal yang mengatur mengenai TPLH sudah tampak beberapa jenis tindak pidana baru walaupun tidak semuanya berkaitan dengan kegiatan korporasi. Perumusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPLH 1997 diatur mulai Pasal 41 sampai dengan Pasal 48, sedangkan UU No 32 Tahun 2009 diatur mulai Pasal 98 sampai dengan Pasal 120. Untuk mengetahui apakah UU No 32 Tahun 2009 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau belum maka dalam mengkaji akan dibandingkan dengan UUPLH No 23 tahun 1997 agar tampak kebaruan dari UU No 32 tahun 2009 tersebut.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH 2009 menentukan : “dengan **sengaja** melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Apabila perbuatan tersebut dilakukan karena kealpaan diatur Pasal 99 ayat (1) yang secara singkat dikatakan bahwa “karena **kelalaiannya** mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

Pasal 98 merupakan “*delic dolus”,* artinya kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan ini baru dapat dihukum, apabila benar-benar mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dapat juga jika perbuatan itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Pasal 99 ini sama dengan ketentuan Pasal 98 hanya bedanya pasal ini merupakan “*delic culpa*”.[[88]](#footnote-89)

Perumusan Pasal 98 dan 99 ini mirip dengan Pasal 41 dan 42 UUPLH 1997 yang merupakan delik materiil. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dikehendaki. Pada delik materiil dikatakan ada delik jika akibat-akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan itu sudah muncul, misalnya tercemarnya masyarakat sekitar, timbul kerugian, timbul penyakit akibat tercemar dsb. Hal itu harus dapat dibuktikan bahwa timbulnya penyakit, tercemarnya air di masyarakat itu akibat dari perbuatan yang bersangkutan. Seperti misalnya kasus tercemarnya kali Banger di Pekalongan yang mengakibatkan matinya hewan ternak masyarakat sekitar, sawah tercemar hingga gagal panen, sumur tidak dapat digunakan karena tercemar.

Pada Pasal 98 dan 99 tidak ada “unsur melawan hukum” dalam perumusan deliknya. Sedangkan perumusan delik materiil Pasal 41 dan 42 UUPLH 1997, mencakup perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan akibat terhadap lingkungan hidup, termasuk manusia serta mahluk hidup lainnya, baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Ketentuan pasal-pasal ini sulit diterapkan dalam praktek, terutama karena selalu tergantung pada ketentuan administrasi (*administrative dependent crimes*). Adapun ketentuan Pasal 41 dan 42 secara singkat adalah:

**Pasal 41**

1. Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat

**Pasal 42** : Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Unsur melawan hukum[[89]](#footnote-90) yang terdapat dalam Pasal 41 UUPLH 1997 juga merupakan syarat untuk terjadinya TPLH di pasal tersebut. Pada UUPLH No 23 tahun 1997, setiap pasal selalu terdapat unsur melawan hukum, dengan rumusan berupa ”secara melawan hukum” atau ”dengan melanggar ketentuan perundang-undangan”. Kebanyakan ahli hukum pidana Belanda berpendapat bahwa unsur melawan hukum/*wederrechtekijkheid*  dan juga unsur kesalahan/*schuld* merupakan unsur yang selalu melekat pada setiap delik, sehingga selalu dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, meskipun oleh pembentuk UU unsur tersebut tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Pasal 41 merupakan delik dolus sedang Pasal 42 perbuatan yang dilakukan karena kealpaan/delik culpa. Sebetulnya ketentuan seperti ini sudah pernah diatur dalam undang-undang lingkungan hidup yang pertama kali ada yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 yang diatur dalam Pasal 22. Pasal 41 ayat (1) UU No 23/1997 tersebut mirip dengan Pasal 22 ayat (1) UU No 4 tahun 1982 dimana perbuatan dilakukan dengan sengaja, sedangkan Pasal 42 ayat (1) mirip dengan Pasal 22 ayat (2) yaitu tindak pidana lingkungan yang dilakukan karena kealpaan. Akan tetapi dalam UU No 4 tahun 1982 masuk kategori pelanggaran sedangkan UUPLH 1997 masuk kategori kejahatan. Sanksi dalam Pasal 42 ini juga lebih berat jika dibanding Pasal 22 ayat (2) dimana apabila perbuatan terjadi karena kelalaian, akan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,-.

Selanjutnya ketentuan Pasal 100-102 UU No 32 tahun 2009 tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang mengakibatkan korban TPLH. Pada pasal-pasal tersebut hanya dikatakan bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah,[[90]](#footnote-91) baku mutu emisi,[[91]](#footnote-92) atau baku mutu gangguan[[92]](#footnote-93). Selain itu juga larangan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik[[93]](#footnote-94) yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, dan melakukan pengelolaan limbah B3[[94]](#footnote-95) tanpa izin, tanpa melihat apakah perbuatan tersebut akan merusak dan/atau mencemarkan lingkungan atau tidak. Adapun pasal-pasal selanjutnya mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 103: menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,

b. Pasal 104: melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

c. Pasal 105: memasukkan limbah ke dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c

d. Pasal 106: memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d,

e. Pasal 107: memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b

Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 103-107 UU No 32 Tahun 2009 ini hampir semuanya berkaitan dengan limbah B3. Pasal-pasal tersebut di atas merupakan delik formil, jadi tidak harus menunggu akibat tindak pidana muncul, cukup apabila perbuatan telah dilakukan maka telah terjadi delik. Ketentuan disini lebih rinci dibanding UUPLH 1997 yang diatur dalam Pasal 43 dan 44. Pasal 103 menunjuk Pasal 59 yang lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan

lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 103 apabila pelakunya korporasi masih terlalu ringan karena dampak dari limbah tersebut bagi masyarakat korban pencemaran lingkungan sangat berpengaruh pada kesehatan.

Pasal 104 menunjuk Pasal 60 dan ini merupakan ketentuan baru yang belum ada sebelumnya dalam UUPLH 1997. Pasal 60 menentukan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan dumping[[95]](#footnote-96) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 105-107 menunjuk Pasal 69 huruf b, c dan d yang berkaitan dengan memasukkan limbah ke wilayah Indonesia. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 69:

a. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ketentuan ini untuk mengantisipasi adanya impor limbah yang dilakukan beberapa pihak.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal di atas secara singkat dan sederhana sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU No 23 Tahun 1997. Kedua pasal ini juga merupakan delik formil. Selengkapnya Pasal 43 dan 44 UU No 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

**Pasal 43**

1. Sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain,
2. Dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat,

**Pasal 44**

1. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat,

Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 41 - Pasal 44 tersebut di atas mengenai unsur melawan hukum ditentukan secara tegas. Walaupun pasal-pasal ini di lapangan sulit dibuktikan namun toh pernah berjasa juga dalam menjerat para pelaku TPLH karena unsur-unsur lain mengenai perbuatan apa yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana, meliputi apa saja sanksi pidananya, jenis delik nya dan sebagainya bisa terinci secara jelas.

Selanjutnya terkait dengan pembakaran lahan diatur Pasal 108 yang menunjuk Pasal 69 ayat (1) huruf h. Pasal ini berkaitan dengan kegiatan pembakaran lahan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi baik untuk keperluan pribadi atau usaha. Bahkan pembakaran juga dilakukan terhadap hutan lindung.

Pasal 109 sampai dengan Pasal 115 merupakan TPLH tetapi tidak berkaitan dengan tindak pidana yang menimbulkan korban. Misalnya Pasal 109 : melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).[[96]](#footnote-97) Selanjutnya Pasal 110:menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i . [[97]](#footnote-98)

 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan sebuah instrumen hukum lingkungan. Amerika Serikat adalah negara yang mempelopori penggunaan dan pengembangan amdal sebagai instrumen dalam proses pengambilan keputusan administrasi di bidang lingkungan. *The National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA)* mewajibkan semua instansi pemerintah federal untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dampak dari suatu kegiatan atau kebijaksanaan terhadap lingkungan melalui suatu kajian yang dituangkan ke dalam ” *Environmental Impact Statement” (EIS).* [[98]](#footnote-99)

 Menurut Ross di banyak negara bagian di Australia, peraturan tentang Amdal Menyebutkan bahwa jika diperlukan dapat memasukkan aspek sosial dalam Amdal. Hal ini berarti bahwa aspek sosial dimaksud hanya optional, sedangkan menurut Undang-Undang Pemerintah Federal, aspek sosial dipersyaratkan untuk masuk dalam Amdal meskipun titik beratnya masih pada lingkungan fisik.[[99]](#footnote-100)

Ditinjau dari sistem pertanggungjawaban pidana, undang-undang ini sudah mengatur lebih rinci mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dibanding dengan KUHP. Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan selain orang perseorangan juga korporasi. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 1 angka 32 yang menentukan bahwa: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, UUPPLH 2009 pengaturannya lebih lengkap dan rinci jika dibandingkan UUPLH 1997. Tuntutan akan diajukan kepada siapa atau siapa yang dipertanggungjawabkan juga sudah ada pengaturannya. Ketentuan mengenai TPLH yang dilakukan oleh korporasi diatur mulai Pasal 116 – Pasal 120 yang menyatakan:

**Pasal 116**

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

 (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 117**

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

**Pasal 118**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

**Pasal 120**

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tidak perlu lagi menafsirkan atau menunjuk siapa yang harus dipertanggungjawabkan apabila korporasi diduga melakukan TPLH. Undang-undang itu sendiri sudah menunjuknya yaitu 1. korporasi, 2. orang yang memberi perintah atau pemimpin tindak pidana. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya jika tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) huruf a sanksi pidana dijatuhkan pada korporasi maka menurut Pasal 118 akan diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan. Ketentuan Pasal 118 tersebut senada dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi kepada korban belum seperti yang diharapkan, karena peraturan masih seperti UUPLH 1997. sebagaimana diatur dalam Pasal 119 bahwa untuk badan hukum yang melakukan tindak pidana maka dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur Pasal 119. Selanjutnya Pasal 119 menentukan bahwa:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

**c. perbaikan akibat tindak pidana;**

d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengertian mengenai “perbaikan akibat tindak pidana” tidak ada penjelasan secara yuridis, sehingga dapat berarti perbaikan terhadap korban manusia, perbaikan terhadap fasilitas publik, maupun perbaikan terhadap lingkungan. Namun bagaimana bentuknya tidak ada ketentuannya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun penjelasan undang-undang padahal peraturan pelaksanaan hingga kini belum ada. Jika demikian dikhawatirkan dalam pelaksanaan nantinya akan sama saja dengan Undang-undang No 23 tahun 1997.

1. **Di luar Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Masalah lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam perundang-undangan lingkungan hidup, namun ada beberapa peraturan yang tersebar di luar UUPPLH.Dilihat dari sisi kuantitas banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup selama ini justru menuai dampak negatif yaitu: (a) ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi antar instansi, (b) perbedaan paradigma dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, (c) pengaturan masih bersifat sektoral dan tidak utuh menyeluruh.[[100]](#footnote-101)

Ada banyak peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di luar UUPPLH, diantaranya yang akan dibahas dalam buku ini adalah:

* + - * 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
				2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
				3. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004

Masing-masing undang-undang akan dibahas mengenai tindak pidananya, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidananya sehingga akan terlihat apakah undang-undang tresebut sudah memberikan perlindungan hukum kepada korban atau belum apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup.

**1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian**

Setiap kegiatan pembangunan, tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak terlepas dari arah pembangunan jangka panjang yaitu pembangunan yang dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Perindustrian menegaskan bahwa upaya dan kegiatan apapun yang dilakukan dalam rangka pembangunan industri ini, tetap harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara tidak boros agar tidak merusak tata lingkungan hidup.[[101]](#footnote-102)

Bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia.

Kegiatan industri meliputi kegiatan untuk merubah sifat bentuk suatu atau beberapa bahan mentah menjadi bahan setengah jadi untuk digunakan menjadi bahan jadi untuk digunakan kegiatan industri lainnya. Bagian yang terpenting dari industri adalah proses pengubahan bahan itu sendiri. Dalam proses pengubahan, bahan masukan yang berupa sumber daya alam, energi dan atau bahan setengah jadi diolah dengan cara atau teknologi tcrtentu. Sebagai hasil dari proses produksi ini, mata keluar hasil produksi yang dikehendaki dan hasil sampingan.

Hasil sampingan yang dapat dalam bentuk materi (misalnya air buangan) atau energi (bunyi, cahaya) yang pada umumnya tidak mempunyai harga pasar diusahakan untuk dipindahkan dari lokasi produksi dengan cara semurah mungkin yaitu dibuang ke lingkungan. Dalam jumlah yang terbatas, buangan dapat diserap oleh lingkungan tanpa adanya ganguan yang berarti. Apabila jumlah meningkat dalam jumlah tertentu, mulai terjadi pengaruh. Disamping pengaruh negatif primer  yaitu pencemaran lingkungan dapat pula terjadi pengaruh-pengaruh tidak langsung atau sekunder, seperti misalnya pengurasan sumber daya alam karena kebutuhan bahan mentah industri melampaui daya dukung lingkungannya. Pengaruh kegiatan industri terhadap lingkungan fisik biologi dan kimiawi dapat dibagi menurut media lingkungan penerimanya, yaitu air, udara dan tanah. [[102]](#footnote-103)

Berangkat dari ketentuan tersebut maka sudah sepantasnya kepada siapapun yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan di bidang perindustrian dikenakan sanksi pidana. Hal itu secara tegas sudah ditentukan dalam penjelasan undang-undang bahwa dalam melakukan pembangunan industri tetap harus memperhatikan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan hidup tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Mengenai ketentuan pidana dalam UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, diatur mulai Pasal 24 sampai dengan Pasal 28, namun yang berkaitan dengan sanksi bidang lingkungan hidup hanya yang terdapat dalam Pasal 27, sedangkan Pasal 27 merujuk pada ketentuan Pasal 21 Bab VIII tentang Industri Dalam Hubungannya Dengan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Pasal 27 berisi tentang:

(1) dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

(2) karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

Pasal 21 ayat (1) menentukan “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.”

Penjelasan Pasal 21 tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa: Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulanginya. Dengan demikian setiap kegiatan industrialisasi maka wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan alam.

Jadi hanya pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Namun demikian dalam pelaksanaannya ada beberapa peraturan menteri perindustrian yang juga menjadi acuan diantaranya:

**1) Keputusan Presiden RI No 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri.**

Pasal 1 angka 1 SK Presiden tersebut menjelaskan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang telah mempunyai Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

Maksud pembangunan kawasan industri adalah untuk: a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri; c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan d. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Dengan adanya kawasan industri maka paling tidak mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan di sembarang tempat karena sudah tertata di tempatkan di satu tempat.

* 1. **Surat keputusan Menteri Perindustrian No: 148/M/SK/7/1995** tentang **Penetapan jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan**

Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan maka jenis komoditi pun dibatasi sehingga sumber daya alam tetap terjaga. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian tersebut ada 207 jenis komoditi yang proses produksinya tidak merusak lingkungan.

Bentuk perlindungan yang diberikan dapat bersifat abstrak maupun konkret. Dikatakan bersifat abstrak apabila perlindungan itu dalam bentuk perumusan perundang-undangan sehingga ada hak-hak dan kepentingan hukum korban yang secara tidak langsung dilindungi. Dapat juga dikatakan jika secara abstrak sudah diatur dalam undang-undang maka diharapkan ada perlindungan untuk tidak akan menjadi korban. Perlindungan secara konkret dapat berupa pemberian ganti rugi meliputi restitusi, kompensasi atau jaminan lain yang diberikan secara konkret. Namun untuk mendapat perlindungan secara konkret maka diperlukan aturan yang jelas dalam suatu perundang-undangan. Karena bagaimanapun juga hukum itu merupakan satu institusi yang mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.[[103]](#footnote-104)

Tindak pidana yang terkait dengan lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan di atas, diatur Pasal 27. Lebih lanjut Pasal 27 UU No 5 Tahun 1984 menentukan:

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

 Dengan demikian sanksi yang ditujukan pada perusahaan yang melakukan perbuatan kejahatan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan sanksinya maksimum pidana penjara 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah , sedangkan pelanggaran Pasal 27 ayat (2) pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimum satu juta rupiah.

Ketentuan mengenai kejahatan dan pelanggaran tersebut datur Pasal 28

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) adalah pelanggaran.

Contoh kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terkait dengan bidang perindustrian sebagaimana yang terjadi di Pekalongan, yang diperiksa diperiksa dan diadili menurut UUPLH no 23/ 1997 jo UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, jo PP 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air jo Kep.Men KLH No. Kep.MNKLN/02/1991 tentang Baku Mutu Limbah dan No. Kep. 35/MENLH/7/1995 tetang Program Kali Bersih.

Kasus pencemaran lingkungan di kali Banger Pekalongan yang terjadi tahun 1995 telah membawa tiga perusahaan besar waktu itu ke meja hijau. Ketiga perusahaan tersebut adalah:

1. CV Ezritex alamat jl A.Yani no 9 Pekalongan
2. PT Kesmatex alamat jl A. Yani 16 Pekalongan
3. PT Bintang Tri prutatex alamat Jl A Yani no 18 Pekalongan

Ketiga perusahaan tersebut diputus bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan dijtuhi pidana denda.

**2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air**

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret 2004, dengan mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Kelahiran Undang-Undang ini mendapat banyak tantangan dari berbagai kalangan, karena didominasi oleh kepentingan ekonomis. Air yang seharusnya memiliki fungsi sosial, seyogyanya dikuasai dan dikelola bersama karena menyangkut hajat hidup orang banyak ternyata justru dikomersialisasikan. Hal itu terjadi karena ada pandangan bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Sesuai dengan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang menyebutkan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu, maka Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 seharusnya juga mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip itu adalah:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
10. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam

Untuk mengetahui undang-undang SDA ini sudah memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH atau belum maka, seperti undang-undang yang lainnya dikaji perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidananya. Perumusan tindak pidana dalam UU No 7 Tahun 2004 ini diatur mulai Pasal 94 - Pasal 96. Masing-masing pasal tersebut kemudian menunjuk pada tindak pidana yang berbeda-beda, Pasal 95 ayat (1) sub a menunjuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 24 sedangkan Pasal 95 ayat (1) sub b menunjuk Pasal 52. Selanjutnya Pasal 95 ayat (2) sub a menunjuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (2) b menunjuk Pasal 64 ayat (7).

Pasal 94 dan 95 pada prinsipnya mengatur hal yang sama yaitu larangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sehingga merugikan pihak lain. Perbedaannya bahwa Pasal 94 dilakukan dengan sengaja sedang Pasal 95 karena lalai.

Selanjutnya Pasal 95 ayat (1) sub a menunjuk Pasal 24 yang menyatakan sebagai berikut:” Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air. Sedangkan Pasal 95 ayat (1) sub b menunjuk Pasal 52 menyatakan bahwa: “Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air”.

 Dengan demikian setiap kegiatan apapun dan dilakukan oleh siapapun baik perseorangan maupun korporasi maka tidak boleh mengakibatkan pencemaran air, apalagi sampai sumber air menjadi rusak, oleh karena itu seharusnya diberi sanksi yang besar kepada pelaku dan kepada korban seharusnya mendapat ganti kerugian.

Selanjutnya Pasal 95 ayat (2) sub a menunjuk perbuatan yang diatur Pasal 32 ayat (3) yang menentukan bahwa: Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.

Pasal 95 ayat (2) sub b menunjuk perbuatan yang diatur Pasal 64 ayat (7): Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

Lebih lanjut Pasal 95 ayat (3) menunjuk Pasal 45 ayat (3) yang menentukan bahwa: Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang dilarang menurut Pasal 94 dan 95

Pasal 94:

(1) a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

(3) a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau

c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);

 Sanksi pidana dari pasal-pasal tersebut komulasi antara pidana penjara dan denda yang bervariasi untuk pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat enam bulan, sedangkan untuk pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

Dari ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut tidak ada satu pasalpun yang berupa sanksi pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban belum terwujud dalam undang-undang ini, karena sanksi yang tinggi ditujukan kepada pelaku tidak menjamin bahwa kerugian korban baik manusia maupun lingkungan akan segera pulih. Walaupun pelaku dijatuhi pidana penjara dan denda tidak serta merta korban yang menderita kerugian segera pulih penderitaannya.

1. **Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan baik secara nasional maupun internasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara terus menerus, berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana bidang kehutanan khususnya tindak pidana penebangan hutan secara liar di Indonesia sudah mengakibatkan kerugian trilyunan rupiah, kerusakan hutan, bencana lingkungan dan ekologi. Bencana ini tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga dunia internasional, sebab hutan kita merupakan paru-paru dunia.

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya, yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena itu perlu dilakukan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas batas negara.

Berhubung dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, maka menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi. Demi terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, maka kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perpu ini kemudian disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 41 ahun 1999 tentang Kehutanan.

Mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur Pasal 78 dan 79, dan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup diatur Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 78 ay (11) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf l

Selengkapnya bunyi Pasal 78 dibuat dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Tindak Pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Kehutanan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Pasal | Tindak pidana | Sanksi |
| 1 | 78 ayat (1) menunjuk ps 50 ay 1 dan 2 | dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan atau dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. | Diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). |
| 2 | Ps 78 ayat (2) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf a, b, c | a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;b. merambah kawasan hutan;c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu | diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). |
| 3 | Ps 78 ayat (3) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf d | Dengan sengaja membakar hutan; | diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000  |
| 4 | Ps 78 ayat (4) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf d | karena kelalaiannya membakar hutan | diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, |
| 5 | Ps 78 ayat (5) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf e atau f | e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; | diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). |
| 6 | Ps 78 ayat (6) menunjuk Ps 38 ayat (4) atau ps 50 ayat (3) huruf g  | 4. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; | diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). |
| 7 | Ps 78 ayat (7) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf h |  h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; | diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000, 00 |
| 8 | Ps 78 ayat (8) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf i | i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; | diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh |
| 9 | Ps 78 ayat (9) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf j | j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang | diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). |
| 10 | Ps 78 ay (10) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf k | k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; | diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). |
| 11 | Ps 78 ay (11) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf l | l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan | diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). |
| 12 | Ps 78 ay (12) menunjuk Ps 50 ayat (3) huruf m | m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. | diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |

Selanjutnya Pasal 78 ayat (13) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil dapat dijumpai di Pasal 78 ayat (1) dan (2), yang merujuk ketentuan di Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3). Pasal 50 ayat (1) menyatakan: Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Sedangkan Pasal 50 ayat (3) berbunyi: Setiap orang dilarang: (a) Mengerjakan dan atau...... (b)..... (m) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Inti dari pasal-pasal di atas adalah adanya larangan terhadap orang dan atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan di kawasan hutan. Sedangkan untuk rumusan tindak pidana materil, dapat dijumpai dalam Pasal 78 ayat (1), yang merujuk Pasal 50 ayat (2). Isi pasal 50 ayat (2) adalah: “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.” Pasal ini merumuskan larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang menjadi intinya adalah bukan uraian perbuatan tetapi perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Menurut Barda Nawawie Arief, semua kategori kejahatan yang dirumuskan di atas adalah sanksi pidana yang sebetulnya adalah sanksi administrasi. Nawawie selanjutnya menegaskan bahwa sanksi administrasi bisa menggunakan kekuatan pidana untuk menimbulkan efek jera yang lebih tinggi.[[104]](#footnote-105)

 Rumusan-rumusan tindak pidana dalam undang-undang ini masuk dalam bab tentang Ketentuan Pidana. Artinya, dari segi teknik perancangan undang-undang, ketentuan-ketentuan ini secara sengaja ditempatkan sebagai delik pidana, bukan sanksi administrasi. Seharusnya, berdasarkan perbedaan bidang hukum, ketentuan-ketentuan sanksi administrasi tidak dicantumkan dalam bab/bagian tentang ketentuan pidana tetapi dalam sanksi administrasi.

Terkait dengan kebakaran hutan, sudah ada peraturan pelaksanaannya yaitu “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan”. Hanya saja Peraturan Pemerintah ini harus segera diganti karena masih mengacu pada UU No. 23 Tahun 1997. Satu-satunya pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 52 yang menentukan:

 Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun bunyi Pasal 11 adalah: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”.

 Apabila dikaji pasal-pasal dari UU No 41 tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas maka tidak ada sedikitpun menyinggung mengenai perlindungan kepada korban. Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (14) hanya menyatakan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.” Berarti korporasi hanya dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing pidana yang dijatuhkan. Korporasi disini hanya dijatuhkan pada pengurusnya baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ini sama dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Dalam bab selanjutnya undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban pemberian ganti rugi kepada penanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian. Pasal 80 ayat (1) menentukan bahwa :”Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Ketentuan ini sama dengan yang diatur dalam UU No 32 tahun 2009 diatur Pasal 87 ayat (1) mengenai pertanggungjawaban mutlak. Selengkapnya bunyi Pasal 87 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.”

Pasal 87 ayat (2) mengatur mengenai sanksi administratif sehingga satu pelaku tindak pidana dapat dikenakan tiga sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana, perdata dan administratif. Selangkapnya Pasal 87 ayat (2) menentukan bahwa: “ Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

 Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau Lahan ada ketentuan mengenai sanksi pidana yang menyatakan bahwa:

Pasal 52

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun bunyi pasal-pasal yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

Pasal 11: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 14

 (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

 (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;

c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

 Pasal 15

 Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan datapenginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 17

 Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.

 Pasal 18

 (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 13

bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi

usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

(2) Pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setelah berkoordinasi dengan Menteri lain yang terkait dan Instansi yang bertanggung jawab.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan demikian maka sebetulnya apa yang ada dalam pasal-pasal peraturan pemerintah tersebut di atas mengulang atau sanksinya mengikuti ketentuan undang-undang umumnya (*general Act)* yaitu UU No 23 tahun 1997 . Jika terjadi TPLH bidang kehutanan sanksi pidana tetap dijatuhkan dan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini korban secara perdata akan diberikan. Tetapi apakah peraturan yang demikian sudah memberikan perlindungan kepada korban? Jika mengacu pada UUPLH dimana korban TPLH belum mendapatkan perlindungan hukum maka undang-undang kehutanan inipun demikian juga.

Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka sanksi kembali seperti yang diatur dalam UUPLH 1997 yaitu pelaku wajib mengganti kerugian sebagaiamana diatur Pasal 49. Lebih lanjut Pasal 49 menentukan sebagai berikut:

Pasal 49

 (1) Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

(3) Tata cara penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

 Dalam hal tata cara penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) belum ditetapkan, maka tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

 (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

a. adanya bencana alam atau peperangan; atau

b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau

c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

(3) jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)c, pihak ketiga bertanggungjawab membayar ganti kerugian.

Baik Undang-undang Perindustrian, Undang-undang Sumber Daya Air dan Undang-undang Kehutanan tidak ada yang mengatur mengenai pertanggungjwaban pelaku kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian. Dengan demikian maka, kepada korban TPLH secara in abstracto sudah mendapat perlindungan, namun secara inconcreto belum sama sekali. Namun semua UU Khusus tersebut harus segera diperbaharui disesuaikan dengan UU Lingkungan hidup yang baru sebagai General Act, apalagi UU Perindustrian masih mengacu pada UULH yang lama yaitu UU No 4 tahun 1982.

**BAB VI**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

**TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**A. Penegakan Hukum Pidana sebagai bentuk Perlindungan hukum terhadap korban**

1. **Pengertian penegakan hukum**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia,[[105]](#footnote-106) Penegakan berasal dari kata dasar “tegak” yang berarti: 1) berdiri, 2) lurus arah ke atas, 3) tetap teguh, tetap tidak berubah, 4) pendiri, setinggi orang berdiri. Sementara itu penegakan berarti proses, perbuatan, cara menegakkan

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement,[[106]](#footnote-107)*  sedang dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving.[[107]](#footnote-108)*. Sebelum diadakan penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ijin ditaati. Ini sering disebut *compliance*. Di Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *compliance* dalam arti preventif pelanggaran hukum lingkungan, sedangkan di Belanda kedua fase itu disebut penegakan hukum *(handhaving*).[[108]](#footnote-109) Sebelum dilakukan tindakan maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasehat. Misalnya mengenai ijin, jika lewat waktu dapat diberikan nasehat agar membuat permohonan perpanjangan ijin atau langsung diberi perpanjangan. Dengan demikian *handhaving* meliputi baik preventif maupun represif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum *(handhaving*). Di Indonesia menurut Andi Hamzah penegakan hukum diartikan secara luas baik preventif maupun represif. Demikian juga dalam penegakan hukum lingkungan.[[109]](#footnote-110)

Strategi penegakan hukum nasional dititikberatkan kepada upaya pencegahan atau preventif. Sarana preventif yang bersifat operasional adalah dilaksanakannya secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya. Tahap berikutnya adalah terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara konsisten, efisien dan efektif. Selanjutnya apabila hal tersebut berhasil atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baru memasuki tahapan yang bersifat represif.[[110]](#footnote-111)

Berbicara mengenai penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ie tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah menurut Satjipto merupakan hakekat dari penegakan hukum. [[111]](#footnote-112)

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dapat disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.[[112]](#footnote-113)

Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[113]](#footnote-114)

Sementara itu menurut Barda Nawawi Arief,[[114]](#footnote-115) Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari ”proses peradilan/mengadili” atau ”proses menegakkan keadilan”. Dengan demikian, pengenaan/penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan ”proses peradilan” (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief[[115]](#footnote-116) sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek yang harus mendapat perhatian dalam penegakan hukum, yaitu:

* + - 1. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
			2. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
			3. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum pidana bertujuan mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
			4. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Sebagai suatu konsep penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi pelbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada di belakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Ini dinamakan konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement). Dalam praktek hal itu tidak mungkin dilakukan karena ada batasan-batasan dalam auran hukum sendiri.[[116]](#footnote-117)

**2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Strategi penegakan hukum nasional dititikberatkan kepada upaya pencegahan atau preventif. Sarana preventif yang bersifat operasional adalah dilaksanakannya secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya. Tahap berikutnya adalah terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara konsisten, efisien dan efektif. Selanjutnya apabila hal tersebut berhasil atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baru memasuki tahapan yang bersifat represif.[[117]](#footnote-118)

Dalam melaksanakan penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto,[[118]](#footnote-119) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

* + - 1. faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undangnya.
			2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
			3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
			4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
			5. faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga apabila terjadi kepincangan pada salah satu unsur maka akan mengakibatkan seluruh faktor terkena dampaknya. Misalnya apabila bicara mengenai peraturan, maka dalam kaitannya dengan penegakan hukum peraturan mempunyai peranan. Maksudnya keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Apabila peraturan yang dibuat sulit dilaksanakan dalam masyarakat maka sebetulnya sejak saat itu sudah dimulai kegagalan dari penegakan hukum.

Faktor penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan *(role*). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga negara msyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan sekaligus. Sehingga kadang diantara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemar dan/ perusak lingkungan ditinjau dari sisi korban sangat diperlukan karena tujuannya untuk melindungi lingkungan dan masyarakat selaku korban .

 Untuk mengetahui apakah penegakan hukum lingkungan sudah sesuai dengan harapan, maka harus ditelaah terlebih dulu kondisi perundang-undangan itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya kebijakan formulasi undang-undang lingkungan hidup belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban TPLH. Pada sub bab ini akan ditelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut, karena jika secara substansi belum mengatur penerapan di lapangan akan ada langkah-langkah atau strategi-strategi tertentu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian faktor manusia dan faktor lingkungan berhubungan dengan proses penegakan hukum.

**3. Penegakan hukum pidana dalam hukum lingkungan**

Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Penegakan hukum bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum saja, tetapi menjadi tanggugjawab seluruh masyarakat.

Keith Hawkins mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanstioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.[[119]](#footnote-120)

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum* *remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Menurut Pasal 78 UUPPLH 2009, apabila sudah dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Sanksi administratif yang dimaksud tersebut terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

Dalam UU No 23 Tahun 1997, penegakan hukum pidana dalam hukum lingkungan bersifat *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir). Penegakan hukum pidana dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dengan dijatuhkannya sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemar dan/ perusak lingkungan ditinjau dari sisi korban sangat diperlukan karena tujuannya untuk melindungi lingkungan dan masyarakat selaku korban .

B. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban TPLH Dalam Praktek Di Indonesia**

Untuk membahas implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup maka dalam konteks ini dikaji melalui kasus-kasus TPLH yang sudah diputus Hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari putusan tersebut akan tampak apakah korban sudah mendapat perlindungan atau belum. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

* + 1. **Kasus Pencemaran Air Sungai Krio akibat buangan limbah B3 (cair) yang dilakukan oleh PT. Everbright, berdasarkan Putusan** Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2714 / Pid.B.2002 / PN.Medan, diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 181/Pid/ 2003/PT-Mdn, dan Mahkamah Agung Nomor 617/K/ Pid/ 2004.

Kasus ini bermula PT. Everbright yang berlokasi di jalan Medan-Binjai Km 9,2 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah sengaja membuang limbah cair ke Sungai Krio sehingga mengakibatkan resahnya penduduk Dusun 1 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut kemudian dilaporkan masyarakat tanggal 10 Februari 2000. laporan itu juga didasarkan hasil penyelidikan berupa pembuangan limbah padat seperti lumpur IPAL, Battery rusak dan debu dari *Dust Collector* yang mengandung Bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti Mercury (Hg), Zink (Zn) ke PT. Kompos yang selanjutnya dijadikan pupuk, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. SUMITO selaku Direktur dan Sdr K. Darsono Halim selaku Manajer pabrik.Terhadap tersangka dipersangkakan Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup subsider Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian lebih lebih subsider Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lebih lebih lebih subsider Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Secara rinci maka dakwaan itu meliputi:

1) Primer, Pasal 43 ayat (1) UU No 23 tahun 1997: sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan / atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

* + 1. Subsider Pasal 27 jo Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi: Perusahaan Industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
		2. lebih subsider Pasal 63 jo Pasal 3, 9, 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 3 :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 9 :

Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang menggunakan B3 dan / atau menghasilkan limbah B3 Wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan / atau menimbun Limbah B3.

Pasal 10:

 Penghasil Limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau penimbun Limbah B-3.

4) lebih lebih subsider Pasal 33 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Pasal 27 :

Di larang membuang benda-benda / bahan-bahan padat dan/ atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan koalitas air, sehingga membahayakan dan/ atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.

Barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Air limbah, limbah padat, tanah dan lumpur.

b. Air dan lumpur sungai Krio

c. Alat bukti surat berupa fotocopy hasil analisa dari laboratorium pusat sarana pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) serpong Jawa Barat yang terdiri dari: hasil analisa lumpur No.65 A-F/ B3/DAL/ 06/2000 tanggal 17 Juli 2000, hasil analisa limbah padat No.66 / B3/ DAL/06/2000 tanggal 17 Juli 2000, hasil analisa Air Limbah No.231 A-B/A/DAL/06/2000 tanggal 17 Juli 2000 dan hasil analisa Air Sungai Krio No.232 /A/DAL/06/2000.

d. Alat bukti surat berupa fotocopy hasil analisa dari Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Medan yang terdiri dari : hasil analisa Bahan Baku PT. Kompos No.002 08 tanggal 22 Februari 2001 dan hasil analisa Produk PT.Kompos.No.002 09 tanggal 22 Februari 2001.

e. Surat pernyataan Sdr. Sumito selaku Direktur PT.Everbright.

Beberapa barang bukti tersebut juga diperkuat bahwa dari hasil penyelidikan dan keterangan para saksi baik itu dari pihak PT.Everbright (Sdr.Ir.Indra Kusuma dan Sdr.Harliandi) maupun pihak PT.Kompos (Sdr.Supriadi Sp dan Sdr Syaiful) diketahui PT.Everbright tidak melakukan pengolahan limbah padat. Selain itu juga dibuktikan dari hasil penyelidikan dan keterangan para saksi dan tersangka diketahui bahwa sesjak tahun 1984 PT.Everbright membuang limbah padatnya berupa lumpur IPAL dan battery rusak serta debu dari dust collector ke PT.Kompos. Disamping itu air sungai Krio sebelum dicemari oleh limbah cair perusahaan yang berlokasi disepanjang sungai tersebut yang salah satunya adalah PT.Everbright masih dapat digunakan sebagai kebutuhan air minum, mandi dan mencuci oleh masyarakat yang berdomisili disekitar sungai Krio tetapi pada saat sekarang tidak dapat lagi dimanfaatkan seperti utuk air minum. Sebagai akibat tersebut maka air sungai Krio tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar DAS karena telah tercemar oleh limbah cair Industri sehingga masyarakat Dusun I Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang melakukan unjuk rasa ke kantor Bapedalda Sumatera Utara dan telah membuat pengaduan tertulisnya kepada Kepala Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang melakukan unjuk rasa kekantor Bapedalda Sumatera Utara dan telah membuat pengaduan tertulisnya kepada Kepala Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa bersalah yang kemudian dikuatkan oleh PT dan MA sehingga kepada pengurus dikenakan pidana denda. Secara yuridis memang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang karena menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dinyatakan bersalah. Namun bagaimana dengan korban limbah sungai Krio tersebut, tidak ada pemberian kompensasi atau restitusi atau ganti kerugian kepada korban. Pada hal pemeriksaan terhadap PT tersebut karena adanya laporan dari masyarakat selaku korban bahkan masyarakat juga mengadakan unjuk rasa. Putusan juga tidak disertai kewajiban kepada pelaku dalam hal ini perusahaan untuk melakukan pemulihan terhadap sungai yang sudah tercemar tersebut sehingga walaupun status perusahaan sudah dinyatakan bersalah namun masyarakat tetap tidak dapat memanfaatkan air sungai karena masih tercemar.

**b. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 161/Pid.B/2003/Pn.Bb Kasus Pencemaran Air Sungai Cimahi Akibat buangan limbah cair oleh PT. Gladiatex Lestari Parahyangan (PT.Gladiatex)**

 Kasus berawal dari proses produksi PT Gladiatex yang menghasilkan / mengeluarkan limbah cair yang dibuang/disalurkan menuju sungai Cimahi. Seharusnya sebelum limbah dibuang dan dialirkan ke sungai diproses terlebih dahulu melalui IPAL I (chemical) dan IPAL II (Proses biologis) sampai dengan memenuhi baku mutu yang ditetapkan berdasaarkan SK Gubernur Jawa Barat No 6 tahun 1999. hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan / rusaknya lingkungan pada sungai cimahi dan aliran sungai yang dilaluinya yaitu matinya biota air atau habitat mahluk hidup yang berinteraksi dengan aliran sungai tersebut dapat mengalami gatal-gatal serta sungai tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum:

Primair: melanggar pasal 41 ayat(1) Jo Pasal 46 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsidair: melanggar pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 46 UU No.23 Tahun 1997 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Lebih Subsidair: melanggar pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 46 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Lebih subsidair lagi: melanggar pasal 42 ayat(1) Jo pasal 46 UU No.23 tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

 Putusan pengadilan:

1. Menyatakan para terdakwa : Terdakwa 1. Drs. Anthonius Kasri Kassa Bin Yunus Kassa, Terdakwa 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz Dan Terdakwa 3. Ery Ramdani Bin Cahyadi.S tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan subsider.
2. Menyatakan para terdakwa : Terdakwa 1. Drs. Anthonius Kasri Kassa Bin Yunus Kassa, Terdakwa 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz Dan Terdakwa 3. Ery Ramdani Bin Cahyadi.S terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kealpaannya melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup”.
3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : Terdakwa 1. Drs. Anthonius Kasri Kassa Bin Yunus Kassa, 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz Dan Terdakwa 3. Ery Ramdani Bin Cahyadi.S. masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan dua tahun.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar denda masing-masing sebesar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)” subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

 Mengkaji putusan Pengadilan negeri tersebut, jika terdakwa terbukti bersalah sehingga dikenakan sanksi pidana Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 maka akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila kemudian dikaitkan dengan Pasal 47. karena sanksi tindakan tata tertib yang ditujukan pada korporasi terdapat dalam Pasal 47 , diantaranya “pemulihan pada keadaan semula”. Namun hal ini tidak dilakukan , apalagi berupa putusan pemberian kompensasi atau apapun bentuknya kepada korban, ternyata juga tidak ada.

**c. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 94/PID.B/2007/PN.KLD tentang Tindak Pidana Lingkungan dengan sengaja membuang zat ke dalam tanah dan udara oleh CV COS -50**

Kasus posisinya adalah sebagai berikut:

 Terdakwa Ita Paryuni alias Yunita Siahaan binti Sobirin Siahaan dan Amin Chandra dengan sengaja melepaskan dan atau membuang zat atau komponen lain berupa residu atau sludge hasil pengolahan minyak pelumas (oli) bekas yang terjadi pada hari Rabu 19 April 2006 sekitar pukul 12.00 WIB di desa Sidodadi Kec Padang Cermin kabupaten lampung Selatan. Sebagai akibat perbuatan pengumpulan dan pengolahan (daur ulang) oli bekas tersebut menghasilkan bau dan asap yang sangat menyengat sehingga banyak masyarakat yang menderita sakit seperti batuk, pusing, mual serta sesak nafas. Asap serta bau tersebut dapat tercium sampai jarak kurang lebih 1 km, selain itu masyarakat mengkhawatirkan terhadap limbah yang dibuang dapat masuk ke sumur warga mengingat lokasi pabrik lebih tinggi dari perumahan warga.

Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dengan sengaja memasukkan zat berbahaya dan beracun ke dalam tanah yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (1) sebagaimana didakwakan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2000.000 subsidair 4 bulan kurungan.

Walaupun bebentuk CV tetapi munculnya kasus ini karena ada gugatan dari masyarakat, namun ternyata juga tidak ada pemberian kompensasi atau apapun bentuknya pada masyarakat selaku korban.

**Tabel 2:**

**Putusan Pengadilan Negeri Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup[[120]](#footnote-121)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Perusahaan** | **Nama terdakwa** | **Pasal dakwaan** | **Putusan PN** | **Putusan PT** | **Putusan MA** |
| **1** | **PT. Everbright** | 1. Sumito, pekerjaan Direktur PT.Everbright,II. K.Darsono Halim, pekerjaan Manager Pabrik PT.Everbright,  | **Primer** Psl 43 ayat (1) UU No 23 / 1997,**Subsider** ,Psl 27 jo Psl 21 ayat (1) U U No 5 / 1984 tentang Perindustrian,**lebih subsider** : Psl 63 jo Ps 3, 9, 10 PP No 18 /1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 | Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2714 / Pid.B.2002 / PN.MedanTerdakwa bersalah yang kemudian dikuatkan oleh PT dan MA sehingga kepada pengurus dikenakan pidana denda | Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 181/Pid/ 2003/PT-Mdn | Mahkamah Agung Nomor 617/K/ Pid/ 2004. |
| **2** | PT. Gladiatex Lestari Parahyangan (PT.Gladiatex) | 1. Drs.Anthonius Kasri Kassa,Pekerjaan kepala Bagian Umum PT.Gladiatex2.Drs.Daniel Diaz Bin Endi Diaz Pekerjaan: Manajer *Human Resource Development* (HRD ) PT.Gladiatex3.Ery RamdaniPekerjaan: Kepala Bagian Utiliti PT.Gladiatex | **Primair:** Pasal 41 ayat(1) Jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. **Subsidair:** Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 46 UU No.23 / 1997 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; **Lebih Subsidair**: melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 46 UU No.23 / 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. **Lebih subsidair lagi**: melanggar Pasal 42 ayat(1) Jo pasal 46 UU No.23 / 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; | Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 161/Pid.B/2003/PN.BB memutuskan:Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sbgmn didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider, oleh krn itu membebskan terdkwa dari dakwaan primer dan subsider. Menyatakan para Terdakwa 1, 2. dan 3. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kealpaannya melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup”. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : masing2 dengn pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan dua tahun. Dan denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 subsidair 2 (dua) bulan kurungan. |  |  |
| **3** | CV COS - 50  | Ita Paryuni alias Yunita Siahaan binti Sobirin Siahaan dan Amin Chandra  | Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 46 jo Pasal 47 UU nomor 23 tahun 1997 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) | Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 94/PID.B/2007/PN.KLD Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (1). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2000.000 subsidair 4 bulan kurungan |  |  |
| 4 | PT Sekar Bengawan | Paulus Tanujaya, Direktur Utama | Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No. 23 tahun 1997 | Bdsk Ptus PN Nomor : 20/Pid/B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2005dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 75.000.000,- subsidair kurungan 1 (satu) bulan | pidana penjara selama 8 bulan dan denda 100,000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan | Terdakwa mengajukan kasasi |
| 5 | CV Suburtex | Iwan Hartoyo pekerjaan direktur dan Adji Silvano Irawan, ST pekerjaan KaBag Finishing | Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No 23 tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP | putusan pidana nomor: 19/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2003: 1. Iwan Hartoyo dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan masa percobaan 8 bulan dan denda 70.000.000,-subsidair dua bulan kurungan. 2. terdakwa II Adji Silvano Irawan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan masa percobaan 7 bulan denda 20.000.000,- subsidair satu bulan kurungan. | Kejaksaan Negeri mengajukan banding sehingga pihak suburtex mengajuka kontra memori banding. Putusan PT Semarang No: 140/PID/2005/PT.SMG memutuskan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyr tanggal 23 mei 2005 sebagaimana tersebut di atas. |  |

Dengandemikian maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum yang kurang. Memang pengaturan undang-undang lingkungan sangat rumit, sehingga penegakan hukumnyapun bisa dikatakan sangat rumit pula. Hal tersebut karena dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen yaitu instrumen administratif, perdata dan hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.

Menurut Barda Nawawi Arief,[[121]](#footnote-122)sistem peradilan/penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, maka pengertian sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek :

1. Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum(di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).
2. Dilihat dari aspek struktural (*legal structure*), sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/ aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum.
3. Dilihat dari aspek budaya hukum (“*legal culture*”), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum).

Secara substansi, putusan hakim pada beberapa kasus TPLH di atas rata-rata sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti mengacu pada undang-undang lingkungan hidup yang berlaku. Namun belum memberikan rasa keadilan bagi korban. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku seharusnya belum membebaskan tanggungjawab dari pelaku terhadap korban. Karena bagaimanapun juga korban tetap menderita kerugian. Memang penjatuhan pidana dalam UUPLH 1997 merupakan alternatif terakhir karena undang-undang ini menganut asas subsidiaritas.

UUPLH memang belum mengatur mengenai hak-hak yang dipunyai oleh korban TPLH, sehingga dari segi substansi undang-undangnya belum ada akhirnya dalam penerapan juga belum ada pemberian kompensasi atau restitusi atau apapun bentuknya yang diberikan korporasi sebagai pelaku kepada korban. Sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan juga tergantung dari undang-undang materiilnya.

Menurut Barda Nawawi Arief[[122]](#footnote-123) sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek yang harus mendapat perhatian dalam penegakan hukum, yaitu:

* + - 1. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
			2. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
			3. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum pidana bertujuan mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
			4. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Yahya Harahap[[123]](#footnote-124) menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan ini berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau *environmental protection.* Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan, antara lain:

1. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia *(encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment).*
2. Perlindungan atas upaya pencegahan (*prevent)* atau melenyapkan kerusakan (*eliminate damage*) terhadap lingkungan dan biosper serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan manusia
3. Hak perlindungan atas pencemaran udara *(air polution)* yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida, nitrogen oxide dan hidro karbon, sehingga udara bebas ntuk selamanya dari pencemaran.
4. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran imbah apapun (*clean water*)

Dikaitkan dengan kondisi penegakan hukum lingkungan saat ini maka dapat dikatakan penegakan hukum lingkungan belum sesuai harapan. Menurut I.S Susanto, [[124]](#footnote-125) setidaknya terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengauhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu: adanya undang-undang lingkungan secara konkrit, melibatkan juga pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum. Keempat faktor tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi dan budaya pada situasi tertentu.

**C.Kasus-kasus Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan di beberapa Negara**

**1. Musibah pabrik Union Carbide di Bhopal[[125]](#footnote-126)**

Pada 3 Desember 1984 malam pukul 00.40 terjadi kecelakaan besar dalam pabrik pestisida milik Union Carbide di kota Bhopal di negara bagian Madya Pradesh India. Musibah itu menewaskan seketika lebih dari 2000 orang, hari-hari berikutnya jumlah korban mati naik lagi sampai 3500 orang. Diduga ada 5000 orang menjadi buta dan 200.000 orang mengalami gangguan kesehatan lainnya. Sebab kecelakaan adalah kebocoran *methyl isocyanate (MIC*) dari tangki E610 yang menyimpan 40 ton lebih dari bahan kimia yang sangat berbahaya. Agaknya kebocoran ini disebabkan karena salah satu pipa baru saja dibersihkan, sehingga air masuk ke dalam tangki. Hal ini mengakibatkan suhu MIC yang disimpan dalam bentuk cairan, naik terus sehingga tekanan gas yang terbentuk membuat tangki meledak. Awan gas maut yang keluar dari tangki menyelimuti sebagian besar kota Bhopal yang saat itu sedang tidur lelap.

Puluhan tahun berlalu, kasus hukum atas tragedi Bhopal yang menewaskan 15 ribu orang lebih masih terkatung-katung. Pengadilan India menghukum tujuh karyawan senior mantan anak perusahaan Union Carbide di India dengan dakwaan "kematian oleh kelalaian" untuk peran mereka dalam tragedi gas Bhopal lebih dari seperempat abad yang lalu. Tragedi itu merupakan bencana industri terburuk dalam sejarah dunia. Perusahaan Union Carbide India Ltd, juga dinyatakan bersalah dengan dakwaan sama. Sayangnya, perusahaan itu tidak lagi ada. Para mantan karyawan yang diadili, banyak dari mereka kini berusia 70-an tahun, menghadapi hukuman dua tahun penjara.

Proses pengadilan kasus ini berjalan sangat lamban dan tidak efektif.
*India Central Bureau of Investigation*, badan atas investigasi di negara itu, awalnya menuduh 12 terdakwa: delapan pejabat senior perusahaan India; Warren Anderson, kepala Union Carbide Corp pada saat gas bocor, perusahaan itu sendiri, dan dua anak perusahaan. Tujuh dari delapan pejabat perusahaan India divonis Senin. Yang lainnya sudah meninggal. Anderson dan Union Carbide tidak pernah muncul di Pengadilan.

Union Carbide yang dibeli oleh Dow Chemical Co pada tahun 2001. Dow mengatakan kasus hukum itu diselesaikan pada tahun 1989 ketika Union Carbide diselesaikan dengan pemerintah India dengan nilai 470 juta dolar AS, dan bahwa semua tanggung jawab untuk pabrik tersebut sekarang terletak pada pemerintah negara bagian Madhya Pradesh, yang kini memiliki situs bekas bencana itu.

Juli lalu, pengadilan yang sama di Bhopal telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Anderson dan juga memerintahkan pemerintah India untuk menekan Washington untuk ekstradisi orang Amerika itu. Hakim tidak menjelaskan mengapa Anderson atau perusahaan kimia Amerika tidak diadili secara in absentia. Anderson ditahan sebentar segera setelah bencana terjadi, namun ia segera meninggalkan negara itu dan sekarang tinggal di New York.

1. **Kasus Trail Smalter di Amerika Serikat[[126]](#footnote-127)**

Kasus Trail Smalter (*Trail Smalter Case*) bermula dari kasus pencemaran udara yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan pupuk milik warga negara Kanada yang dioperaikan di dalam wilayah Kanada, dekat sungai Columbia lebih kurang 10 mil menjelang perbatasan Kanada-AS. Mulai tahun 1920 produksi emisi perusahaan tersebut meningkat. Emisi mengandung sulfur dioksida, menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut mencapai 300 ton sulfur setiap hari. Emisi tersebut karena terbawa angin bergerak ke wilayah AS melalui lembah sungai Columbia dan menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air dan udara, kesehatan serta berbagai kepentingan penduduk Washington lainnya.

 AS kemudian melakukan klaim terhadap Kanada dan meminta kanada bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita AS. Setelah melakukan negosiasi, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan kasus itu melalui International Joint Commision, suatu badan administratif yang dibentuk berdasarkan *Boundary Waters Treaty* 1907.

Pada tahun 1931 komisi tersebut berhasil menyelesaikan pekerjaannya untuk mengumpulkan fakta, dan melaporkan bahwa kerugian yang diderita AS termasuk yang terjadi dan masih diperkirakan mencapai jumlah 350.000 dolar AS. Kanada yang tidak mempersoalkan jumlah tersebut menyetujui membayarnya.

 Pada tahun 1931 AS kembali menuntut ganti rugi sebesar 2 (dua) juta dolar AS dari pihak Kanada berhubung polusi yang terjadi masih terus menerus berlangsung. Tuntutan kedua diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang dibentuk oleh kedua negara. Badan Arbitrase dalam keputusannya menetapkan dua hal, pertama mewajibkan Kanada membayar ganti rugi sebesar 78.000 dolar AS dan kedua, mewajibkan Kanada untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul pada masa-masa selanjutnya (*to prevent the future damage*), menurunkan emisi sampai tingkat tidak melampaui ambang batas (*acceptable level*).

 Kasus tersebut menunjukkan bahwa siapapun pelakunya wajib bertanggungjawab kepada pihak yang dirugikan. Kebetulan kasus tersebut melintas batas negara sehingga negara lain juga berhak mengajukan ganti kerugian bahkan juga mewajibkan untuk mencegah kerugian selanjutnya.

1. Kasus Minamata di Jepang [[127]](#footnote-128)

Pada kasus ini yang diselesaikan dengan negosiasi antara pelaku dan korban juga ada campur tangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Keberadaan penyakit Minamata pertama kali dilaporkan oleh Dokter Hosokawa tahun 1956. Pada tahun 1959 Universitas Kumamoto menemukan penyebabnya yakni karena masyarakat mengkonsomsi ikan yang tercemar air limbah pabrik PT Chisso.

Melaui perjuangan yang panjang, seperti lewat pengadilan atau negosiasi akhirnya para korban berhasil mendapatkan ganti rugi dari PT Chisso. Persetujuan tersebut ditandatangani pada tanggal 9 Juli 1973. Dengan adanya surat persetujuan ini PT Chisso harus membayar ganti rugi kepada pasien yang diakui secara resmi.

Bagi korban yang tidak diakui resmi sebagai pasien minamata masih ada kemudian mengajukan keberatan kepada Badan Lingkungan pemerintah Pusat tahun 1971. Badan lingkungan mengabulkan permohonan mereka dan memerintahkan Pemda Kumamoto untuk memberikan pengakuan resmi terhadap pasien yang tidak dapat disangkalnya. Namun PT Chilsso menolak berunding dengan pasien baru yang diakui oleh ”keputusan badan lingkungan tahun 1971”.

 Sebetulnya penyelesaian kasus Minamata ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah rincinya ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan kepada korban. Para korban /penderita penyakit Minamata dan PT Chisso kemudian mengadakan negosiasi yang menghasilkan mengenai persetujuan ganti rugi sebagai berikut:

Untuk menyelesaikan masalah ganti rugi kepada pasien dan keluarganya, kelompok negosiasi para pasien penyakit Minamata di Tokyo dan PT Chisso menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. PT Chisso mengakui secara jujur bahwa selama ini pabrik mereka di Minamata membuang limbah ke teluk Minamata tanpa pengolahan yang cukup, sehingga mencemarkan kawasan sekitar Minamata, Akibatnya timbul penyakit Minamata yang amat menyengsarakan kehidupan masyarakat.
2. PT Chisso menyesal, karena walaupun telah ditemukan penyakit Minamata secara resmi tahun 1956 mereka tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan yang cukup untuk mencegah perluasan pencemaran, mencari sebab, menolong para korban dll.
3. PT Chisso menyatakan permohonan maaf dengan tulus kepada para pasien dan keluarganya karena telah menyebabkan penderitaan fisik bagi mereka yang terjangkit penyakit minamata, maupun penderitaan mental karena sikap PT Chisso yang mengabaikan mereka sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
4. Pengadilan Negeri Kimamoto telah mengabulkan seluruh tuntutan para pasien penyakit Minamata yang menyatakan bahwa penyakit minamata disebabkan air limbah pabrik PT Chisso. Akibat kesalahannya PT Chisso harus mentaati seluruh isi keputusan tersebut serta melaksanakannya apa yang telah diperintahkan dalam keputusan ini.
5. supaya tidak terulang lagi kesalahan PT Chisso memastikan bahwa tidak akan membuat polusi lagi pada masa-masa mendatang, serta senantiasa menghilangkan kecemasan masyarakat dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Sementara itu juga dilakukan pembersihan di kawasan minamata yang masih tercemar.
6. PT Chisso segera mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan sekarang secara tulus untuk pengobatan, pelatihan, rehabilitasi sosial dan memberikan pekerjaan bagi para pasien serta meningkatkan kesejahteraan pasien lain dan keluarganya.

Ada pernyataan penyesalan dan permohonan maaf dari pelaku yang ditujukan kepada korban. Ini justru lebih mengena pada korban, apalagi kemudian disertai pemberian ganti kerugian kepada korban. Proses seperti ini sesuai dengan *teori restorative justice* yang kita kenal selama ini. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.[[128]](#footnote-129)

**Tabel 3: Pemberian Ganti Kerugian Pada Kasus Minamata Jepang**

**Tanggal 9 januari 1991[[129]](#footnote-130)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Uang ganti rugi | 18.000.000 yen | 17.000.000 yen | 1.600.000 yen |
| Uang ganti rugi untuk keluarga | Suami - isteri 4,5 - 6.000.000 yenOrang tua-anak 1-3000.000 yen | Suami-isteri 3.500,000 yen,  orang tua-anak 1000.000 yen |  |
| Tunjangan khusus seumur hidup | 146.000 yen | 76.000 yen | 56.000 yen |

Selain ganti kerugian tersebut di atas biaya pengobatan untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit minamata semuanya ditanggung oleh PT Chisso.

**Tabel 4 : Tunjangan Biaya Pengobatan Pada kasus Minamata**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian**  | **Jangka waktu** |
| Untuk pasien opname | Lebih dari 15 hari, 31.000 yen | 8 – 14 hari, 29. 100 yen | Sampai 7 hari, 21.800 yen |
| Untuk pasien rawat jalan | Lebih dari 8 hari, 21.800 yen | 2 – 7 hari, 19.800 yen |  |
| Biaya perawatan | 40.500 yen per bulan |  |  |
| Biaya upacara kematian | 474.000 yen dan ditinjau setiap dua tahun sekali. |  |  |
| Pengobatan di mata air panas | 4 kali penginapan dan 32 kali tiket perjalanan pulang pergi per tahun. |  |  |
| Biaya transportasi ke rumah sakit | Di bawah 10 km 270 yen/hari | Lebih dari 10 km 400 yen/ hari | Lebih dari 20 km 600 yen/ hari dan Pulau yang lain 680 yen/ hari |

Kasus Minamata merupakan kasus pencemaran lingkungan yang higga kini menarik untuk dikaji. Walaupun pada awalnya PT Chisso mengelak untuk mengakui bahwa terjadinya pencemaran itu diakibatkan oleh perusahaannya, namun pada akhirnya mengakui yang kemudian meminta maaf kepada korban dan pada akhirnya mmemberi ganti kerugian, biaya pengobatan bahkan ada yang diberikan pekerjaan.

**BAB VII**

**PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP KORBAN**

1. Pengertian Restorative Justice

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Berawal dari tulisan mengenai korban oleh B Mendelshon tahun 1947 yang kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana yang lain, maka korban kejahatan semakin mendapat perhatian. Apalagi sejak dikeluarkannya Resolusi MU-PBB No 40/34 tanggal 29 Nopember Tahun 1985 tentang *Declaration of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* nasib korban semakin diperhatikan.

Deklarasi PBB Tahun 1985 kemudian menjadi trend dalam pembaruan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Di samping itu, deklarasi tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan menjadi persoalan dasar kehidupan manusia dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat dan negara dan proses peradilan pidana. Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaaan peradilan pidana yang dikenal dengan falsafah “ keadilan restoratif” (*Restorative Justice). [[130]](#footnote-131)* Atas dasar falsafah ini, secara objektif persoalannya bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan.[[131]](#footnote-132)

*Retorative justice* (keadilan *restorative*) kadang-kadang disebut dengan keadilan reparative adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan antara korban dan pelaku, bukan hanya menghukum pelaku. Korban dalam hal ini mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatan mereka, untuk mengganti kerugian atas tindak pidana yang telah dilakukan, dengan meminta maaf. *Restorative justice* ini menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku. Dalam kamus hukum dikatakan bahwa yang dimaksud keadilan restoratif adalah:

*Restorative justice: an alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim’s needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender’s accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.*[[132]](#footnote-133)

Beberapa pengertian mengenai *restorative justice* adalah sebagai berikut:

*Restorative Justice*[[133]](#footnote-134)*is a systematic response to crime victimization that emphasizes healing the injuries of victims, offenders and communities caused criminal behavior. Practices and programs that reflect restorative purposes respond by: 1. identifying and taking steps to repair harm,  2. involving all  stakeholders, and 3. transforming the traditional relationships between communities and their governments in responding to crime victimization.*

Pendapat lain mengatakan bahwa *Restorative Justice is a new term for an old concept. Throughout the history of human kind restorative justice approaches have been used in order to solve conflicts between parties and to restore peace between parties and to restore peace in communities.*[[134]](#footnote-135)Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa, *Restorative Justice is a systematic response to crime victimization that emphasizes healing the injuries of victims, offenders and communities caused criminal behaviour. [[135]](#footnote-136)*

 Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.[[136]](#footnote-137)

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, seperti yang tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: Restorative justice is a new framework for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counselling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community[[137]](#footnote-138)

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan *restorative* sebagai  nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

 Keadilan restoratif memang ditujukan untuk merespon kepentingan korban sehingga undang-undang tidak hanya fokus pada pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh John P.J. Dussich[[138]](#footnote-139) yang mengatakan bahwa *Restorative justice is a systematic response to crime victimization that emphasizes healing the injuries of victims, offenders and communities caused criminal behavior. Practices and programs that reflect restorative purposes respond by: 1. identifying and taking steps to repair harm,  2. involving all  stakeholders, and 3. transforming the traditional relationships between communities and their governments in responding to crime victimization.*

Jadi keadilan restoratif merupakan respon sistematis untuk korban kejahatan yang menekankan penyembuhan luka korban, pelaku dan masyarakat disebabkan karena adanya perilaku kriminal. Program ini mencerminkan tujuan restoratif yaitu dengan : 1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan; 2. Melibatkan semua pemangku kepentingan; dan 3. mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dan  pemerintah mereka dalam merespon korban kejahatan.

1. **Konsep Perlindungan Hukum terhadap Korban yang akan datang**

Keadilan restoratif juga berarti memulihkan korban, serta mengembalikan pelaku dan memulihkan masyarakat. Memulihkan korban  berarti memulihkan harta yang hilang atau memulihkan cidera, ini berarti memulihkan rasa aman.
Dengan demikian maka ada mediasi antara pelaku dan korban dengan mediator pihak lain bisa negara atau pihak ketiga. Ada yang menyebut dengan istilah *Victim Offender Mediation (VOM). Victim Offender Mediation (VOM) is a face-to-face meeting between the victim of a crime and the person who committed that crime with a trained mediator.* [[139]](#footnote-140)

 Dalam pertemuan VOM, pelaku dan korban berbicara satu sama lain tentang korban, pengaruh itu pada kehidupan mereka, dan perasaan mereka tentang hal itu.Tujuannya adalah untuk membuat rencana yang disetujui bersama untuk memperbaiki kerusakan atau cedera yang terjadi sebagai akibat dari kejahatan itu. VOM ini ada yang menyebut dengan *Victim-Offender Dialogue, Victim-offender conferencing, victim-offender reconciliation.[[140]](#footnote-141)*

Hukum acara pidana Jerman memungkinkan adanya mediasi antara korban dan pelaku, yang di sebut sebagai “*Victim-offender mediation*”. VOM ini dapat dilakukan baik baik oleh kantor Kejaksaan atau Pengadilan. Korban dan pelaku mediasi juga menawarkan untuk mencapai resolusi konflik yang memuaskan di luar ruang sidang, dengan keterlibatan pihak ketiga yang tidak memihak.

Di Jerman tidak ada lembaga satu pun yang bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi korban-pelaku. Sebaliknya, itu adalah sampai ke masing-masing negara bagian (*Länder)* untuk memutuskan siapa yang dapat komisi dengan korban-pelaku mediasi. Inilah sebabnya mengapa ada sejumlah besar organisasi yang berbeda di Jerman yang berhubungan dengan korban-pelaku mediasi. Hal ini juga diperlukan bagi organisasi  untuk menjadi sebuah lembaga Negara.

 Pertama harus diingat sebagai titik paling penting bahwa penyelesaian sengketa di luar hukum tidak dilakukan dalam kasus-kasus serius misalnya dalam kasus tindak pidana perkosaan. VOM hanya dlkukan untuk mediasi resolusi konflik yang kasus kecil dan kurang-serius. Yang penting adalah bahwa kedua belah pihak bersedia untuk berpartisipasi dalam mediasi. Ini tidak mungkin untuk  melakukan mediasi antara  korban-pelaku  dalam kasus di mana terdakwa menyangkal tuduhan terhadap dirinya dan tetap mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah.

  Keuntungan adanya mediasi antara pelaku dan korban adalah: bagi korban maka mediasi menjadikan proses lebih sederhana dari pada proses pengadilan. Terutama ada kemungkinan dapat memperoleh kembali kerugian yang diderita tanpa memerlukan birokrasi yang lama dibandingkan dengan sidang yang hasilnya tidak pasti. Bagi pelaku keuntungannya, ia dapat mengambil tanggungjawab atas perbuatannya, sehingga paling tidak mempengaruhi perilakunya di masa depan.

Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative  peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan.

1. Korban belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada.

2. Pelaku, bahwa pelaku mau melakukan evaluasi diri untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bertolak dari hal terebut di atas maka dengan konsep *restorative justice* maka bertujuan untuk menekankan pada penyembuhan luka dari korban, pelaku dan masyarakat. Apabila saat ini penjatuhan sanksi kepada pelaku/ *offender* langsung dari Negara, maka dengan konsep *restorative justice* antara pelaku dan korban ada komunikasi dan Negara sebagai fasilitator. Konsep seperti ini sebagaimana gambar di bawah ini yang dikemukakan oleh Tatsuya Ota .[[141]](#footnote-142)

Fungsi negara sebagai fasilitator ini senada dengan pendapat Wolfgang Friedmann,[[142]](#footnote-143) bahwa negara mempunyai empat fungsi yaitu: 1) fungsi negara sebagai *provider* (penjamin kesejahteraan masyarakat); 2) fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur); 3) fungsi negara sebagai *enterprenur* (pengusaha); dan 4) fungsi negara sebagai *umpire* (pengawas, wasit)

1. R.M Gatot Sumartono, ***Hukum Lingkungan Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 195 [↑](#footnote-ref-2)
2. Philip Kristanto, ***Ekologi Industri,*** Penerbit Andi dan Universitas Kristen Petra Surabaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 155. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commision on Environmenat and Development* didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan menurut Jacobs diperlukan empat syarat yang meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (*the fulfilment of human needs*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity)*, keadilan sosial (*social equity*) dan kesempatan menentukan nasib sendiri (*self detemination*). lihat Sudharto P. Hadi, ***Dimensi Hukum*** ***Pembangunan Berkelanjutan***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, halaman 2. Menurut N.H.T Siahaan, dalam buku, ***Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan***, Erlangga, Jakarta, 2004, halaman 237 dikatakan bahwa ada tiga unsur penting dalam prinsip pembanguan berwawasan lingkungan yaitu: 1. penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana; 2. menunjang pembangunan yang berkesinambungan; dan 3. meningkatkan mutu hidup. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
5. . Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2006, Jakarta, hal. 24. [↑](#footnote-ref-6)
6. ##  [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id/) Potret Advokasi Ekologis vis a vis Kejahatan Korporasi,**Tanggal Buat: 20 Feb 2007 | Tanggal Update: 20 Feb 2007**

 [↑](#footnote-ref-7)
7. Jaringan advokasi Tambang, ***Tambang, Militerisaasi dan Pembunuhan***, 30 oktober 2007 [↑](#footnote-ref-8)
8. Soedjono Dirdjosisworo, **P*engamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri****,* Alumni, Bandung, 1983, hlm. 31. Lihat juga Wisnu Arya Wardhana, ***Dampak Pencemaran Lingkungan,*** Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25, yang mengatakan bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan dampak tak langsung. Dikatakan dampak langsung apabila kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif memang diharapkan. Akan tetapi dampak langsung yang bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: 1. pencemaran udara, 2. pencemaran Air dan 3. pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan.. [↑](#footnote-ref-9)
9. Steven Box, ***Power, Crime and Mystification***, Tavistock Studies in Sociology, Tavistock Publ. London, 1983, halaman 64, dalam Muladi, ***Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana***, BP Undip, Semarang, 1997, hlm. 167. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, Suhandari M. Putri, ***Schema CSR***, Kompas, 4 Agustus 2007 dalam, Hendrik Budi Untung, ***Corporate Social Responsibility****,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1. [↑](#footnote-ref-11)
11. Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan****,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-12)
12. Mudzakir, ***Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana****,* Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 295. [↑](#footnote-ref-13)
13. Andi Hamzah, ***Penegakan Hukum Lingkungan****,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 60 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sumber data dokumen Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta. [↑](#footnote-ref-15)
15. Sumber data Pengadilan Negeri Pekalongan [↑](#footnote-ref-16)
16. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Lihat Sudarto : 1981, 133 [↑](#footnote-ref-17)
17. Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,*** Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 62. [↑](#footnote-ref-18)
18. Arif Gosita, ***Masalah Korban Kejahatan,*** Akademika Pressindo, Jakarta, 1985 hlm.44. [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdussalam, ***Victimology***, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muladi, ***Op.cit.*** hlm. 175. [↑](#footnote-ref-22)
22. John P. J. Dussich, Ph. D. ***Victimology – Past, Present And Future,***  California State University, Fresno, Tokiwa International Victimology Institute, Tokiwa University Victimology Graduate School. Lihat juga Zvonimir Paul Separovic, ***Victimology Studies of Victims***, Zagreb, 1985, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ediwarman, ***Victimologi Kaitannya Dengan pelaksanaan Ganti Rugi Tanah***, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-24)
24. Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-26)
26. Rena Yulia, ***Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,*** Graha Ilmu, Bandung, hlm. 45-46 [↑](#footnote-ref-27)
27. J. E. Sahetapy, ***Victimologi Sebuah Bunga Rampai,*** Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-28)
28. Arif Gosita, Op. Cit, hlm.44. [↑](#footnote-ref-29)
29. Prassel, Frank R, ***Criminal Law, justice, and Society****,* Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc, 1979, hlm. 66 dalam Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-30)
30. Arif Gosita, Op. Cit, hlm.43 [↑](#footnote-ref-31)
31. I. Markus Willy P. Dan M. Dikkie Darsyah, ***Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris***, Arkola, Surabaya, tanpa tahun, hlm . 392 dan 516 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ediwarman, Op. Cit, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan***, Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, cetakan keempat, Jakarta, 1993, hlm. 461. [↑](#footnote-ref-34)
34. Bryan A Garner (editor in Chief), ***Black’s Law Dictionary***, Eight Edition, Thomson West, 2004, hlm. 598. [↑](#footnote-ref-35)
35. *General Assembly 40/34, United Nations,* ***Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,*** *29 November 1985*  [↑](#footnote-ref-36)
36. Col. Veng Sothy, ***Country Report on Victim Protection and Abuse of Power,*** Kingdom of Cambodia Ministry of Interior ,Commissariat General National Police, 02 August, 2005, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-37)
37. Zvonimir Paul Separovic, ***Victimology***, Studies Of Victims, Zagreb, 1985, hlm 8. [↑](#footnote-ref-38)
38. Arif Gosita , Op. Cit, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-39)
39. J.E Sahetapy, ***Victimologi sebuah Bunga Rampai****,* Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.25 [↑](#footnote-ref-40)
40. Jo Goodey, ***Victims and Victimology Research, Policy and Practice,*** Pearson Longman, England, 2005, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-41)
41. John Brian Griffin, ***Participation of the Public and Victim in Criminal Justice Administration,*** *Part One, Resource Material Series No. 56, Work Product of the 112th International Training Course “Participation of the Public and Victim for More Fair and effective Criminal Justice”, UNAFEI.*  [↑](#footnote-ref-42)
42. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban dalam Pasal 1 angka (2). [↑](#footnote-ref-43)
43. Lilik Mulyadi, ***Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi,*** Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 120-121. [↑](#footnote-ref-44)
44. Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-45)
45. Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom,Op. Cit, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-46)
46. Paul Zvonimir Separovic, ***Victimology International Action and Study of Victims,***  Papers given of the “Fifth International symposium on Victimology” 1985 in Zagreb, Yugoslavia, Volume I, Theoritical Issue (General Part) and Documents edited by Zvonimir Paul Separovic, dalam Iswanto, ***restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan,*** Purwakerto, 2002, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-47)
47. Arif Gosita, ***Masalah Perlindungan Anak***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 86-87 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid*., hal. 52-53 [↑](#footnote-ref-49)
49. Satochid Kartanegara lebih cenderung menggunakan istilah delict karena menurutnya telah lazim dipakai, lihat Satochid kartanegara, ***Hukum Pidana Kumpulan Kuliah,*** Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-50)
50. P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181 [↑](#footnote-ref-51)
51. Durkheim, Durkheim*,. “Crime as a Normal Phenomenon”.* Dalam J. E. Sahetapy*. Kriminologi I. 1987. Pusat Studi Kriminologi Universitas Airlangga. Surabaya.* [↑](#footnote-ref-52)
52. Ibid hal 203. [↑](#footnote-ref-53)
53. Muladi, Op. Cit, hlm. 202. [↑](#footnote-ref-54)
54. Muladi, Op. Cit, hlm. 195. [↑](#footnote-ref-55)
55. Ibid, hlm. 196. [↑](#footnote-ref-56)
56. Nyoman Serikat Putra Jaya, ***Kapita Selekta Hukum Pidana,*** Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 254. [↑](#footnote-ref-57)
57. Sudharto P. Hadi, ***Aspek Soaial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode***, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-58)
58. Muladi, Op. Cit, hlm. 196. [↑](#footnote-ref-59)
59. Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara,*** Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-60)
60. A. J. Milne, ***The Idea of Human Rihts”***, dimuat dalam F.E Dewrick, ed, Human Rights: Problems, perspectives and texts, hlm 23, dalam Philipus M Hadjon, ibid, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-61)
61. Sudarto, ***Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-62)
62. Muladi, ***op.cit.***, hlm. 176-177 [↑](#footnote-ref-63)
63. Hendrik Budi Untung, ***Corporate Social Responsibility,***  Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-64)
64. Muladi, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Badan Penerbit Undip, Semarang 1995, hlm 35. [↑](#footnote-ref-65)
65. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, ***Filsafat Hukum Pidana***, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-66)
66. Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,*** Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61. [↑](#footnote-ref-67)
67. John P. J. Dussich , ***Basic Concepts of Victimology*** September 27, 2005, Tuesday [↑](#footnote-ref-68)
68. ibid [↑](#footnote-ref-69)
69. Anonim , ***Penyantunan Korban Penganiayaan Berat***, op.cit, hlm. 71. dalam Sukinta, ***Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Pidana***, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-70)
70. Herbert Edelhertz dan Geis, ***Public Compensation Victims of Crime,*** New York: Prager Publishing, 1974, hlm.4 dalam, Abdussalam, ***Victimology,*** PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 274. [↑](#footnote-ref-71)
71. Arif Gosita, ***Relevansi Viktimologi Dengan pelayanan terhadap para korban Perkosaan****,* Ind Hill-Co, Jakarta, 1987, hlm: 20 [↑](#footnote-ref-72)
72. Abdussalam op. Cit, , hlm. 275-276 [↑](#footnote-ref-73)
73. Koesparmono Irsan, ***Korban Kejahatan Perbankan,*** dalam J.E Sahetapy et.al., ***Bunga Rampa Viktimisasi,*** Eresco, Bandung, 1995, hlm. 16.  [↑](#footnote-ref-74)
74. Koesparmono Irsan, ***Korban kejahatan Perbankan,* dalam *Bunga Rampai Viktimisasi****,* Editor JE Sahetapy, Eresco, Bandung, 1995, hlm 17 [↑](#footnote-ref-75)
75. Anonim, ***Penyantunan Korban Penganiayaan Berat***, hlm. 73, dalam Sukinta, op. Cit, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-76)
76. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, ***Panduan Penghitungan ganti kerugian akibat Pencemaran dan Atau perusakan Lingkungan,*** , 2006 [↑](#footnote-ref-77)
77. Ibid. [↑](#footnote-ref-78)
78. ibid [↑](#footnote-ref-79)
79. Emiko Okubo, **Protection and Support for Crime Victims** , September 8, 2005

 (Early Assistance Group for Crime Victims Designated by the Tokyo Public Safety Commission) [↑](#footnote-ref-80)
80. Muladi, op.cit., hlm 177-179 [↑](#footnote-ref-81)
81. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), ***Model Perlindungan Saksi dan Korban Tergantung Anggota LPSK****, 5* oktober 2007 [↑](#footnote-ref-82)
82. Kata “barang siapa” dalam rumusan undang-undang tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”. Karena tindak pidana itu adalah perbuatan orang, lihat Sudarto, ***Hukum Pidana I,*** Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-83)
83. Jan Remmelink, ***Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP******Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia****,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 97. [↑](#footnote-ref-84)
84. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 125 UU No 32 tahun 2009 yang menyatakan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [↑](#footnote-ref-85)
85. Pasal 124 UU No 32 tahun 2009 menyatakan :Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan

Undang-Undang ini. lebih lanjut Pasal 126 menegaskan: Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. [↑](#footnote-ref-86)
86. Lihat Konsiderans Undang-undang No 32 tahun 2009 [↑](#footnote-ref-87)
87. Disampaikan Rachmat Witular (Menteri Negara Lingkungan Hidup waktu itu) dihadapan anggota DPR dalam Rapat Paripurna membahas soal pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RUU tentang Ketenagalistrikan dan RUU tentang Perfilman. sebagaimana dimuat dalam Harian berita Sore.com tanggal 8 september 2009 [↑](#footnote-ref-88)
88. Secara harafiah arti kata culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Untuk mengukur ‘kurang berhati-hati tidaklah mudah, karena adakalanya seseorang bertindak sangat berhati-hati, ada yang tidak begitu berhati-hati, ada yang kurang lagi dan ada juga yang serampangan bahkan ugal-ugalan. Lihat Wirjono Prodjodikoro, ***Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia***, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 67 Hazewinkel Suringa, mengartikan kealpaan sebagai: 1. kekurangan penduga-duga, atau 2. kekurangan penghati-hati. Van Hamel berpendapat bahwa: kealpaan mengandung dua syarat: 1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; 2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Sedangkan Simons mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan mempunyai dua unsur yaitu: 1. tidak adanya penghati-hati; dan 2. dapat diduganya akibat. Lihat Sudarto, ***Hukum Pidana I***, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 125 [↑](#footnote-ref-89)
89. Van Hamel membagi melawan hukum atau “*wederrechtelijk*” dalam dua kelompok. Kelompok pertama paham positif yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai “*in strijd met* *het recht*” atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedang kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan wederrechtelijk sebagai *“niet steunend op het recht*” atau tidak berdasarkan hukum, ataupun sebagai “*zonder bevoegdheid*” atau tanpa hak, lihat P.A.F. Lamintang, Op. Cit, hlm. 347. Perkataan melawan hukum dalam beberapa peristiwa berarti “bertentangan dengan ketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang”, lihat J.M. van Bemmelen, ***Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiil bagian umum***, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 149. Ada dua macam pengertian melawan hukum yaitu: 1. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2. bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, Van Bemmelen, ibid, hlm 150. [↑](#footnote-ref-90)
90. Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Huruf b menentukan bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air . [↑](#footnote-ref-91)
91. Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2) Huruf e :yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah

ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. [↑](#footnote-ref-92)
92. Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Huruf f: yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan. [↑](#footnote-ref-93)
93. Penjelasan Pasal 101 menentukan bahwa: yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-94)
94. Pasal 1 angka 21 UU No. 32 Tahun 2009 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. [↑](#footnote-ref-95)
95. Pasal 1 angka 24 UUPPLH 2009 menentukan bahwa dumping (pembuangan) adalah kegiatan

membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. [↑](#footnote-ref-96)
96. Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. [↑](#footnote-ref-97)
97. Pasal 69 ayat (1) huruf I menentukan i. Setiap orang dilarang: menyusun amdal tanpa memiliki

sertifikat kompetensi penyusun amdal; [↑](#footnote-ref-98)
98. Takdir Rahmadi, ***Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,*** Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 16-17. [↑](#footnote-ref-99)
99. Hellen Ross, ***Aboriginal Control and Participation in Australian SIA,*** Paper presented at International Association for Impact Assesment Meeting, Montreal Canada, June 24-28 1989, dalam Sudharto P. Hadi, ***Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode***, edisi kedua Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-100)
100. Maharani Siti Shopia, ***Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan,*** Jentera Jurnal Hukum Edisi 18-Tahun IV, Januari-Juni 2008, ISSN 1412-6842, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-101)
101. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. [↑](#footnote-ref-102)
102. Nasruddin, Dampak Kegiatan Industri dan Penanggulangannya, [www.pembangunanindustri\_gorontalo.com](http://www.pembangunanindustri_gorontalo.com), 14 Desember 2007 [↑](#footnote-ref-103)
103. Satjipto Rahardjo, ***Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia****,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-104)
104. Barda Nawawi Arief, ***Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP***”, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007. [↑](#footnote-ref-105)
105. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar bahasa Indonesia,*** Balai Pustaka, 1993, hlm. 912. [↑](#footnote-ref-106)
106. Kata *Enforcement* berarti *the act or process of compelling compliance with a law, mandate, command, decree or agreement,*  lihat Bryan A Garner, ***Black’s law Dictionary,*** Eight edition, Thomson West, 2004, hlm. 569. Sedangkan  *Law enforcement adalah: 1) The detection and punishment of violations of the law. This term is not limited to the enforcement of criminal laws. For examples: the freedom of information Act contains an exemption from disclosure for information compiled for law enforcement purposed and furnished in confidence. The exemption is valid for the enforcement of a variety of non criminal laws (such as national security laws) as well as criminal laws. 2) criminal justice, 3) police officers and other members of the executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law.* Bryan A Garner, ***Black’s law Dictionary,*** Eight edition, Thomson West, 2004, hlm. 569. [↑](#footnote-ref-107)
107. *Handhaving* dalam bahasa Belanda menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administrative, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku umum dan individual, lihat Andi Hamzah, ***Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-108)
108. Andi Hamzah, ***Penegakan Hukum Lingkungan,*** Sinar grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-109)
109. Ibid. hlm. 49. [↑](#footnote-ref-110)
110. Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur pada seminar nasional ***Penegakan Hukum Lingkungan,*** tanggal 9 Desember 1995 di Surabaya, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-111)
111. Satjipto Rahardjo, ***Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,*** Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-112)
112. Ibid hal 24 [↑](#footnote-ref-113)
113. Soerjono Soekanto, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,***  Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-114)
114. Barda Nawawi Arief, ***Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional,*** Disajikan dalam Studium Generale, Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007. [↑](#footnote-ref-115)
115. Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Apek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,*** Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-116)
116. Muladi, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995, hlm. 39 [↑](#footnote-ref-117)
117. Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur, op.cit, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-118)
118. Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-119)
119. Koesnadi Hardjasoemantri, ***Hukum tata Lingkungan***, edisi ketujuh cetakan keempat belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 376. [↑](#footnote-ref-120)
120. Sumber data kasus No 1, 2 dan 3 dari Kementerian Lingkungan Hidup, kasus no2 dan 3 Pengadilan Negeri Karanganyar [↑](#footnote-ref-121)
121. Barda Nawawi Arief, Makalah dalam Seminar “***Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif***”, FH UNDIP, 19 Desember 2009. [↑](#footnote-ref-122)
122. Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Apek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,*** hal. Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hlm 13. [↑](#footnote-ref-123)
123. Yahya Harahap, ***Beberapa Tinjauan Mengenai sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 339-340. [↑](#footnote-ref-124)
124. IS Susanto, ***Pemahaman Kritis Terhadap Realita sosial,***  Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 9 Tahun 1992 [↑](#footnote-ref-125)
125. K. Bertens, ***Pengantar Etika Bisnis***, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm 304-305. Lihat juga Republika.co.id, **Setelah Seperempat Abad, Kasus Bhopal Kembali Dibuka** Selasa, 08 Juni 2010 03:37 WIB, diunduh Minggu, 24 Rajab 1432 / 26 Juni 2011 | 15:07 [↑](#footnote-ref-126)
126. Ida Bagus Wyasa Putra, ***Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional,*** Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 45-46 [↑](#footnote-ref-127)
127. Yayasan Pusat Penyakit Minamata-Soshisha, ***Penyakit Minamata Dalam Gambar (Illustrated******Minamata Disease****),* Edited by Foundation Minamata Disease center Soshisha, published by Ashi Shobo Inc, 1998, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-128)
128. Rena Yulia, ***Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan,*** Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 165. [↑](#footnote-ref-129)
129. Yayasan Pusat Penyakit Minamata-Soshisha,Op. Cit, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-130)
130. Daniel W. Van Ness, ***Restorative Justice and International Human Righ****t, dalam Joe Hudson dan Burt Galaway, eds, Restorative Justice, Illonois: Charles C Thomas Publisher , 1996,* hlm. 17-36*,* dalam Mudzakkir, ***Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana****,* Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 171. [↑](#footnote-ref-131)
131. ibid [↑](#footnote-ref-132)
132. Bryan A Garner (editor in Chief), ***Black’s Law Dictionary***, Eight Edition, Thomson West, 2004, hlm. 1340 [↑](#footnote-ref-133)
133. John P. J. Dussich, ***Basic Concepts of Victimology***, The UNAFEI 131st International Training Course,

September 27, 2005, Tuesday [↑](#footnote-ref-134)
134. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, ***Handbook on Justice for Victims ,*** New York, 1999, hlm. 42-43 [↑](#footnote-ref-135)
135. John P. J. Dussich, ***Basic Concepts of Victimology***, The UNAFEI 131st International Training Course, September 27, 2005, Tuesday [↑](#footnote-ref-136)
136. Rena Yulia, ***Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan,*** Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 165. [↑](#footnote-ref-137)
137. ##  <http://djpp.depkumham.go.id/kegiatan-umum/927-restorative-justice-dan-penerapannya-dalam-hukum-nasional.html>, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan [Restorative Justice dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional](http://djpp.depkumham.go.id/kegiatan-umum/927-restorative-justice-dan-penerapannya-dalam-hukum-nasional.html), Senin, 06 Desember 2010 15:53 diunduh 25 Februari 2011 15.10

 [↑](#footnote-ref-138)
138. John P.J. Dussich, ***Basic Concepts of Victimology***, The UNAFEI 131st International Training Course [↑](#footnote-ref-139)
139. ibid [↑](#footnote-ref-140)
140. John P.J. Dussich, ***Basic Concepts of Victimology***, The UNAFEI 131st International Training Course,

 September 27, 2005, Tuesday [↑](#footnote-ref-141)
141. Tatsuya Ota , ***Victim Support Scheme & Restorative Justice in Asia*** , UNAFEI, 9 September 2005 [↑](#footnote-ref-142)
142. Wolfgang Friedmann, ***The State and The Rule ol Law in A Mixed Economy***, Steven and Sons, London, 1971, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-143)